



# ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024

Setiap coretan dan untaian kata yang tercantum dalam buku ini didedikasikan kepada seluruh insan BPS di mana pun berada. Atas segala pengorbanannya, atas setiap tetesan keringat dan bahkan tak jarang air mata, atas semua upayanya menjadi garda terdepan dalam mewujudkan tersedianya statistik berkualitas untuk Indonesia.



**Arah Perubahan  
Badan Pusat Statistik  
2021-2024**

No. Publikasi: 02100.2104

Katalog: 1201052

Ukuran Buku: 17,6 x 25 cm

Jumlah Halaman: 125 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik

Penyunting:

Badan Pusat Statistik

Gambar Kulit:

Direktorat Diseminasi Statistik

Gambar:

Direktorat Diseminasi Statistik

Foto:

Bagian Hubungan Masyarakat

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik

Sebagian ilustrasi bersumber  
dari: [www.freepik.com](http://www.freepik.com)

Dilarang mengumumkan,  
mendistribusikan,  
mengomunikasikan, dan/atau  
menggandakan sebagian  
atau seluruh isi buku ini untuk  
tujuan komersial tanpa izin  
tertulis dari Badan Pusat  
Statistik



# **ARAH PERUBAHAN BADAN PUSAT STATISTIK 2021-2024**



# Daftar Isi

## Sekapur Sirih ..... 06

Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, dibutuhkan kesiapan dan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan.

## BPS Kapal Besar Kita ..... 08

Pergantian nakhoda pasti terjadi, tetapi komitmen untuk membawa kapal besar ini berlayar lebih jauh harus tetap terjaga.

## 1 Pembangunan Statistik yang Lebih Luas ..... 18

Melalui SNPSI, pembangunan statistik dapat dilihat dalam lingkup nasional sekaligus memperkuat kolaborasi dengan seluruh penyelenggara kegiatan statistik.

## 2 Transformasi Proses Bisnis Statistik ..... 26

Mempercepat transformasi proses bisnis statistik melalui integrasi kegiatan statistik dan pemanfaatan *big data*.

## 3 Penguatan Pembinaan Statistik Sektoral ..... 32

Menjawab tantangan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral dengan pembinaan yang kolaboratif dan inovatif.





## 4 Adaptasi Tata Kerja Era Baru ..... 42

Membangun pola hubungan kerja yang kolaboratif serta lingkungan kerja yang fleksibel, dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi.

## 5 Mencetak SDM BPS yang Unggul ..... 50

Membuka peluang untuk pengembangan kompetensi dan karier yang lebih luas bagi pegawai BPS se-Indonesia melalui manajemen pola karier dan talenta.

## 6 Kinerja Terpadu untuk BPS Berkelas Dunia ..... 56

Sekecil apa pun kontribusi kita, akan sangat berarti dalam mewujudkan BPS berkelas dunia.

## 7 Kolaborasi Mengawal Perubahan BPS ..... 66

Kolaborasi seluruh unit kerja dalam pengawasan internal akan mengawal proses bisnis dan pencapaian hasil seluruh perubahan di BPS.

## Rencana Aksi BPS 2021-2024 ..... 74

## Manajemen Perubahan..... 114

## Mari Berlayar Bersama ..... 116

Nakhoda sehebat apapun tidak akan mampu membuat kapal berlayar tanpa bantuan seluruh awak. Kita semua harus bersinergi agar bisa melaju lebih jauh lagi.

# SEKAPUR SIRIH

---



*Margo*

**Margo Yuwono**

Kepala Badan Pusat Statistik

Di tengah dunia yang penuh disrupti, jika kita masih bertahan pada zona nyaman, maka kita akan tergerus dan tertinggal. Cara lama yang sudah usang, tidak bisa lagi diandalkan untuk memecahkan berbagai masalah. Terlebih di masa pandemi COVID-19, saat berbagai hal menjadi sangat terbatas untuk dilakukan. Perubahan bukanlah lagi suatu pilihan, tetapi telah menjadi suatu kepastian. Namun keputusan untuk merespons perubahan ada di tangan kita: ikut berubah dan beradaptasi, atau tetap diam dan tenggelam.



Kita tahu statistik hanya akan memberikan manfaat ketika digunakan. Bahkan saat ini, statistik menjadi semakin krusial, karena berbagai informasi yang tepat dan relevan sangat diperlukan untuk menjawab ketidakpastian. Sebagai rujukan utama dalam statistik, BPS perlu hadir di depan untuk menjadikan data statistik lebih bermanfaat dalam berbagai proses pembangunan nasional.

Respons BPS sudah jelas, yaitu berubah ke arah yang lebih baik. Berbagai tantangan baru perlu dijawab dengan kesiapan dan perencanaan yang matang. Oleh karena itu, arah perubahan BPS ke depan perlu dirumuskan, untuk selanjutnya diketahui, dipahami, dan dijalankan oleh seluruh jajaran BPS.

Harapannya, kita dapat bersinergi dalam melaksanakan perubahan tersebut dan berkontribusi lebih besar lagi untuk Indonesia Maju.

Buku Arah Perubahan BPS memuat gambaran besar mengenai perubahan-perubahan yang akan terjadi di BPS, baik dalam jangka pendek, maupun menengah-panjang. Arah perubahan BPS disusun dengan melibatkan seluruh pimpinan tinggi, baik di tingkat pusat maupun daerah dengan harapan perubahan yang dirancang menjadi lebih lengkap dan menyeluruh. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pihak yang membantu penyusunan buku ini. Semoga, dengan adanya buku ini, dapat memberikan rasa optimis terhadap BPS di masa yang akan datang.



“Perubahan itu pasti,  
sehingga BPS juga harus  
berubah”

# BPS KAPAL BESAR KITA

Pergantian nakhoda pasti terjadi, tetapi komitmen untuk membawa kapal besar ini berlayar lebih jauh harus tetap terjaga.

Barat sebuah kapal, BPS adalah bahtera yang telah berlayar melalui berbagai riak ombak dan badai sejak lama. Bahtera megah ini dinakhodai oleh orang-orang hebat yang setiap masanya menciptakan kejayaan dengan capaian-capaian luar biasa. Setiap pergantian nakhoda selalu mewariskan tradisi hebat yang mendorong bahtera tersebut maju, terus bertumbuh menghadapi arus dan tantangan-tantangan baru. Sang nakhoda berdiri di haluan menentukan arah diikuti seluruh awak bahtera yang mendukung penuh dengan loyalitas dan dedikasi tinggi untuk melaksanakan setiap arahan.





Kolaborasi kepemimpinan yang kuat nan bijak disertai dengan awak yang cakap serta berintegritas ini berhasil membawa eksistensi bahtera dalam mengarungi zaman hingga saat ini. Kini, bahtera harus terus berlayar menghadapi dimensi baru yang terus bergerak, penuh ketidakpastian, kompleks, dan ambigu. Sang nakhoda baru pun harus berbenah, menancapkan layar imaji bahtera yang kokoh agar disegani tanpa mengesampingkan modernisasi kerangka utama demi meningkatkan akselerasi dan berhasil mengarungi samudra.

Penggalan fragmentasi di atas bukan sekadar fiksi belaka jika BPS dan formasi baru pimpinannya mampu menerjemahkan tantangan perubahan zaman ke dalam sebuah strategi perubahan yang jitu. Strategi tersebut harus terpetakan dalam *road map* yang jelas akan siapa, melakukan apa, bagaimana, serta kapan *output* akan dihasilkan. Arah perubahan BPS harus sejalan dengan program prioritas nasional, di antaranya memperkuat ketahanan ekonomi melalui pengentasan kemiskinan, meningkatkan SDM berkualitas, serta mendukung pengembangan ekonomi. Tentu saja kita akan mengawal dari sisi statistik dan data pendukung kebijakannya. Untuk itu, BPS perlu berkolaborasi dengan K/L/D/I dalam mewujudkan keberhasilan program prioritas nasional ini.

Kami segenap jajaran pimpinan dalam formasi baru ini berkomitmen penuh untuk mempertahankan tren positif kinerja BPS dan berupaya mendorong terciptanya berbagai terobosan dalam menghadapi tantangan saat ini. Tantangan tersebut berupa kemajuan pesat teknologi informasi yang mengubah tatanan pengelolaan data. Selain itu, ketidakpastian akibat pandemi telah mengubah sebagian besar proses bisnis di hampir semua lini. Komitmen dan tradisi pencapaian ini telah tertoreh dalam prasasti prestasi BPS pada setiap masanya.

## PIMPINAN BPS DAN CAPAIANNYA



**1 Sarbini Somawinata**  
1956-1966

1. UU No. 7 Tahun 1960 tentang Statistik diresmikan
2. Sensus penduduk dilakukan pertama kali tahun 1961



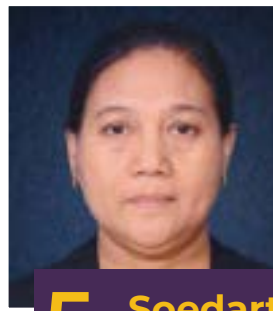
**4 Sugito Suwito**  
1994-2000

1. Pengesahan UU No. 16 Tahun 1997 tentang statistik
2. Penetapan 26 September sebagai Hari Statistik Nasional



**2 Abdul Majid**  
1966-1982

Sensus Penduduk pertama di tahun berakhiran "0" pada tahun 1980



**5 Soedarti Surbakti**  
2000-2004

Menjaring dukungan agar BPS tetap vertikal



**3 Azwar Rasjid**  
1982-1994

Indonesia menjadi Chair United Nations ESCAP



**6 Choiril Maksum**  
2004-2006

Membuat data penduduk *by name by address* yang menjadi cikal bakal data bantuan langsung tunai



## 7 Rusman Heriawan 2006-2011

1. Menelurkan kebijakan *one man one PC*
2. Rancangan arsitektur gedung BPS yang seragam
3. Meningkatnya kerjasama statistik antar kementerian
4. *Core value* BPS



## 9 Suhariyanto 2016-2021

1. Kolaborasi BPS dengan Kemendagri menuju Satu Data Indonesia
2. Publikasi data dalam bentuk kekinian
3. Merintis kegiatan Kerangka Sampel Area (KSA)
4. Meraih berbagai prestasi baik nasional maupun internasional
5. Sensus Penduduk Online pertama dalam sejarah
6. Pencanangan SP2020 oleh Presiden RI
7. Kepala BPS dianugerahi penghargaan Pemimpin Perubahan tahun 2020



## 8 Suryamin 2011-2016

1. Predikat WTP tiga tahun berturut-turut
2. Pembangunan Gedung Baru STIS
3. Perbaikan dan penambahan infrastruktur BPS
4. *Open bidding* pertama di BPS

**S**erangkaian prestasi tersebut tentunya sangat membanggakan. Kini, nakhoda telah berganti lagi. Namun, upaya untuk mewujudkan BPS menjadi organisasi yang disegani tetap akan dilanjutkan. Kami ingin bertumbuh bersama pegawai dengan integritas, ditunjang modernisasi, dan kinerja yang efektif. Pergantian ini merupakan momentum yang tepat untuk membakar kembali semangat bersinergi dan berkolaborasi. Mari kita menggapai cita-cita BPS menjadi “*World Class National Statistical Office (NSO)*” atau kantor statistik berkelas dunia.





**Margo Yuwono menjadi pembicara dalam acara Forum Merdeka Barat 9 bertema “SP2020 Satu Data Indonesia”.**

## ■ MARGO YUWONO: NAKHODA BARU KITA

**P**ria kelahiran Blitar, 5 Juni 1963 ini resmi dilantik sebagai Kepala BPS RI pada tanggal 25 Juni 2021. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Utama (2020-2021), Deputy Bidang Statistik Sosial (2018-2020), Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah (2016-2018), Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik (2014-2016) serta pernah menjabat menjadi kepala seksi di bagian neraca regional. Beliau merupakan lulusan D3 Akademi Ilmu Statistik (1986) yang kemudian menamatkan gelar sarjana hingga doktor di Institut Pertanian Bogor Program Studi Ekonomi Pembangunan.

Penyuka matematika dan naik gunung ini mengaku tidak pernah bercita-cita menjadi seorang kepala BPS. Namun siapa sangka, takdir telah menghantarkan penggemar Presiden Soekarno ini menjadi orang nomor satu di BPS pada tahun 2021 untuk meneruskan perjuangan para pimpinan sebelumnya. Ketika diwawancara oleh Tim Humas bagaimana gaya kepemimpinan yang akan diterapkan, beliau pun menjawab bahwa beliau adalah sosok yang tidak suka dengan rutinitas, bersifat revolusioner, serta menyukai perubahan dan tantangan-tantangan baru. Beliau ingin menempatkan BPS untuk menjadi dirigen dalam

Saya tidak memiliki waktu yang panjang untuk memimpin BPS. Tapi, Saya akan terus berbenah dan memastikan hal-hal terkait perbaikan internal dijalankan dengan baik.

---

perencanaan kebutuhan data pemerintah dan menjadi *decision support system* di masa depan. Tidak hanya memberikan data, tetapi lebih jauh lagi, BPS harus mampu memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan. Hal itu akan membuat posisi BPS semakin kuat dalam pemerintahan. “Saya tidak memiliki waktu yang panjang untuk memimpin BPS. Yang ingin saya capai adalah perbaikan di internal. Saya akan terus berbenah dan memastikan hal-hal terkait dengan pola karier untuk selalu dijalankan dengan baik. Saya juga berusaha agar setiap pegawai memiliki kontribusi yang jelas dalam institusi.”



# PEJABAT PIMPINAN

Kelahiran Pati pada tahun 1962. Dilantik sebagai Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa pada tanggal 6 Juli 2020. Setelah menamatkan pendidikan di Akademi Ilmu Statistik tahun 1985 beliau meraih gelar Sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia serta gelar Magister Sains dari Program Ilmu Ekonomi Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor tahun 2010.

## Setianto

Deputi Bidang Statistik  
Distribusi dan Jasa

## Akhmad Jaelani

Inspektur Utama

Kelahiran Purbalingga pada tahun 1963. Beliau dilantik sebagai Inspektur Utama pada tanggal 31 Agustus 2015 sampai sekarang. Sebelumnya, beliau adalah Kepala Biro Kepegawaian, Kepala BPS Provinsi Lampung, dan Kepala BPS Provinsi Jambi. Meraih gelar *Bachelor of Statistics* setelah menamatkan pendidikan di Akademi Ilmu Statistik tahun 1985 kemudian memperoleh gelar Doktorandus dari Fakultas MIPA Program studi Statistika dari Universitas Padjajaran. Gelar Magister Ekonomi Studi Pembangunan didapatnya dari Universitas Syiah Kuala tahun 2014.



## Imam Machdi

Deputi Bidang Metodologi dan  
Informasi Statistik

Meraih gelar *Bachelor of Science in Computer Science* di *Lousiana State University and Agricultural and Mechanical College* (1995) kemudian Magister Teknik dari ITS (2000). Gelar Doctor diperoleh dari Tsukuba University (2010). Sebelumnya menjabat sebagai Asisten Deputy Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



# AN TINGGI MADYA

Kelahiran Tegal. Dilantik sebagai Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik pada tanggal 18 Mei 2021. Lulusan terbaik D3 Akademi Ilmu Statistik (1991), kemudian meraih gelar Sarjana Statistik dari Institut Teknologi 10 Nopember, serta gelar Magister Pertanian dari Universitas Lambung Mangkurat tahun 2005. Pernah menjabat sebagai Kepala BPS Provinsi Sulawesi Utara, Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan (2020-2021).

## **M. Edy Mahmud**

(Deputi bidang Neraca dan Analisis Statistik)



## **M. Habibullah**

Deputi Bidang Statistik Produksi

Pria kelahiran Musi Rawas pernah menjabat sebagai Kepala BPS Provinsi Maluku Utara pada tahun 2013. Meraih gelar master di Bidang Ekonomi dari Universitas Sriwijaya, Palembang tahun 2008.

## **Ateng Hartono**

Deputi Bidang Statistik Sosial

Pria kelahiran Cirebon. Menjabat sebagai Deputy Bidang Statistik Sosial pada 12 Oktober 2020. Alumni Akademi Ilmu Statistik (1992) dengan gelar Doktor di bidang Ilmu Ekonomi pada Universitas Sumatera Utara (2016) dan Magister Ilmu Sosial dari Universitas Tanjung Pura (2007).

## BERLAYAR DALAM SINERGI

Langkah strategis menjadi kunci keberhasilan. Oleh karena itu, pimpinan telah menetapkan beberapa arah perubahan sebagai acuan kita untuk melangkah bersama, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Langkah-langkah perubahan ini telah mempertimbangkan unsur kebutuhan BPS untuk terus bertumbuh, rekomendasi penyempurnaan dari pihak eksternal BPS, dan dari visi pimpinan tentang masa depan BPS yang berkelas dunia. Arah perubahan BPS dituangkan dalam beberapa tema penting dan kemudian diterjemahkan dengan rencana aksi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Di antaranya:

### 1 Pembangunan Statistik yang Lebih Luas

Penguatan kolaborasi yang berkesinambungan dengan berbagai penyelenggara kegiatan statistik diwujudkan dalam dokumen SNPSI. Dalam kolaborasi ini, BPS berupaya merajut kesepahaman mengenai berbagi-pakai data administrasi. Regulasi untuk memayungi keamanan data dan kerahasiaan data pribadi juga perlu ditata ulang. Tak lupa, perencanaan infrastruktur dan kompetensi SDM di bidang statistik harus terintegrasi guna menghasilkan kerangka statistik nasional yang komprehensif.

### 2 Transformasi Proses Bisnis Statistik

Melakukan penyempurnaan proses bisnis statistik dengan menempatkan kembali neraca nasional dan statistik makro sebagai penerima manfaat utama dari kegiatan statistik yang dilakukan sesuai prinsip perubahan statistik BPS. Oleh karena itu, integrasi kegiatan statistik akan dipercepat implementasinya. Pemanfaatan *big data* dalam *official statistics* akan dioptimalkan untuk merespons kebutuhan data yang semakin cepat.





### 3 Penguatan Pembinaan Statistik Sektoral

Kapasitas seluruh penyelenggara kegiatan statistik perlu ditingkatkan guna menjamin standar dan kualitas *output*. Tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif, efisien, dan andal. Untuk itu, BPS sebagai pembina data statistik akan menyusun pedoman pembinaan yang standar, memfasilitasi kegiatan statistik sektoral, dan mengevaluasi pembangunan statistik sektoral secara berkala.

### 4 Adaptasi Tata Kerja Era Baru

Proses bisnis statistik yang terintegrasi dan penguatan kolaborasi dengan seluruh penyelenggara kegiatan statistik, menuntut BPS untuk mengubah pola hubungan kerja menjadi kolaboratif dan kaya akan fungsi. Dengan berubahnya pola hubungan kerja tentu akan memengaruhi lingkungan kerja, di mana BPS akan menerapkan ruang kerja yang fleksibel beserta digitalisasi cara bekerja.

Perubahan BPS bisa berjalan kalau Para Pimpinan punya komitmen tinggi atas perubahan itu sendiri. Kami ingin bertumbuh bersama pegawai dengan sinergi dan kolaborasi.

### 5 Mencetak SDM BPS yang Unggul

Perkembangan tata kerja baru dan proses bisnis menuntut kualifikasi tambahan pada kompetensi SDM BPS seperti *data science* dan komunikasi statistik. BPS juga akan memfokuskan kejelasan pola karier dan pengembangan kompetensi sebagai pemenuhan kebutuhan pegawai. Untuk itu, organisasi juga akan membangun manajemen talenta ASN sebagai langkah strategis terhadap rencana suksesi BPS di masa yang akan datang.

### 6 Kinerja Terpadu untuk BPS Berkelas Dunia

Peningkatan kualitas manajemen SDM perlu dibarengi dengan kejelasan kinerja dari setiap pegawai. Oleh karena itu, indikator kinerja organisasi harus dapat terpetakan dan terbagi habis ke dalam kinerja setiap pegawai sesuai jabatannya. Indikator kinerja juga akan berbasis kepada hasil kerja yang dibingkai dalam sistem manajemen kinerja berdasarkan peraturan yang berlaku secara nasional.

### 7 Kolaborasi Mengawal Perubahan BPS

Perubahan yang terjadi di berbagai hal haruslah ditopang juga dengan pengawasan internal yang menyeluruh, baik dari sisi audit keuangan maupun akuntabilitas kinerja. Oleh karena itu, manajemen risiko harus menjadi budaya dan dilaksanakan seluruh unit kerja serta kualitas auditor harus ditingkatkan untuk menggaransi pencapaian visi misi BPS.



# PEMBANGUNAN STATISTIK YANG LEBIH LUAS

Pembangunan statistik dimulai dengan penguatan kolaborasi bersama K/L/D/I dalam menentukan kerangka proses bisnis dan konsep statistik yang standar serta platform untuk digunakan bersama. Hal ini ditunjang dengan payung hukum berbagi pakai data dan peningkatan literasi statistik agar pembangunan statistik berjalan konsisten

Ateng Hartono  
Deputi Bidang Statistik Sosial



Penyusunan SNPSI yang dituangkan dalam regulasi



Penyiapan infrastruktur untuk penerapan SNPSI



Peningkatan literasi SNPSI kepada para pemangku kepentingan



Kolaborasi dan koordinasi antar K/L/D/I serta penetapan standar data statistik



**Satu Data Indonesia, NSPK Statistik Sektor, SDGs, Open Data, Pemanfaatan Big Data untuk Official Statistics, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan langkah pencapaian yang dapat dicakup dalam Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI) demi mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien**

Peningkatan kualitas dan keragaman data statistik melalui koordinasi kegiatan statistik antar K/L/D/I merupakan salah satu tantangan besar dalam mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN). Hal ini dikarenakan tiap Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Instansi (K/L/D/I) memiliki mandat masing-masing untuk melakukan pengumpulan data. Dampak dari hal tersebut antara lain adalah terjadinya duplikasi kegiatan oleh penyelenggara kegiatan statistik; data yang dikumpulkan tidak relevan dengan kebutuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional; ataupun justru terdapat data yang sangat dibutuhkan untuk perumusan

kebijakan nasional namun belum ada K/L/D/I yang mengumpulkan datanya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu disusun strategi percepatan perwujudan Sistem Statistik Nasional (SSN). SSN merupakan suatu tatanan yang terdiri atas unsur- unsur kebutuhan data statistik, sumber daya, metode, sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, perangkat hukum, serta masukan dari Forum Masyarakat Statistik yang secara teratur saling berkaitan. Dengan terwujudnya SSN, para penyelenggara kegiatan statistik akan mampu memanfaatkan sumber daya secara optimal, menghindari



kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan, serta memastikan penyediaan seluruh data yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan nasional.

Langkah-langkah untuk mencapai terwujudnya SSN yang andal, efektif, dan efisien dituangkan dalam Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI). Secara umum, SNPSI merupakan suatu kerangka untuk membangun kapasitas statistik bagi penyelenggara kegiatan statistik dan pengguna data serta penguatan koordinasi lintas K/L/D/I yang bertanggung jawab terhadap pengumpulan data statistik. Namun secara khusus, SNPSI dapat didefinisikan sebagai penguatan kapasitas BPS dalam mengintegrasikan seluruh kegiatan statistik yang tercakup dalam SSN. Keterlibatan seluruh stakeholders (produsen data, pengguna data, dan responden) sangat dibutuhkan dalam penyusunan dan suksesnya implementasi SNPSI.

Terdapat empat agenda yang perlu dilakukan untuk memastikan terwujudnya SNPSI, yaitu:

- 1 ➤ Penyusunan SNPSI yang dituangkan dalam regulasi
- 2 ➤ Penyiapan infrastruktur untuk penerapan SNPSI
- 3 ➤ Peningkatan literasi SNPSI kepada para pemangku kepentingan
- 4 ➤ Kolaborasi dan koordinasi antar K/L/D/I serta penetapan standar data statistik



## PENYUSUNAN SNPSI YANG DITUANGKAN DALAM REGULASI

Data statistik yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan agar target pembangunan tercapai sesuai rencana pembangunan yang telah disusun. Namun, belum seluruh data yang dibutuhkan dapat disediakan oleh K/L/D/I penyelenggara kegiatan statistik. Ditambah lagi, masih terdapat duplikasi kegiatan statistik yang dilakukan oleh K/L/D/I. Oleh karena itu, perlu disusun suatu Strategi Nasional Pengembangan Statistik Indonesia (SNPSI) secara menyeluruh yang mencakup semua sektor. Di level nasional, SNPSI harus diselaraskan dengan program prioritas pemerintah. Sementara di level internasional, SNPSI harus mampu merespon kebutuhan lembaga internasional dalam memotret isu yang menjadi perhatian dunia.

Tahapan penyusunan SNPSI adalah:

### ■ Identifikasi Cakupan Strategi Dalam SNPSI

Strategi yang akan dicakup dalam SNPSI ditargetkan sudah diidentifikasi di akhir tahun 2021. Strategi ini merupakan bagian dari upaya implementasi pembangunan statistik yang selaras dengan SSN dalam mencapai tujuan pembangunan Indonesia, antara lain:

- Satu Data Indonesia (SDI)
- Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Statistik Sektoral
- *Sustainable Development Goals* (SDGs)
- *Open Data*
- Pemanfaatan *big data* untuk *official statistics*
- Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

## Strategi Nasional Pengembangan Statistik Indonesia

merupakan kerangka, proses, dan prosedur yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas data statistik yang dihasilkan oleh K/L/D/I penyelenggara kegiatan statistik.

Mengarus-utamakan statistik ke dalam kebijakan dan proses perencanaan pembangunan nasional

Menghasilkan data statistik/informasi sesuai kebutuhan beragam pengguna

Mengoptimalkan kesesuaian SSN

### ■ Pemetaan Stakeholders SNPSI

Di awal tahap persiapan penyusunan SNPSI juga perlu dilakukan pemetaan para pemangku kepentingan dalam SNPSI yang umumnya dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. produsen data, untuk mengetahui kegiatan statistik yang diselenggarakan K/L/D/I dan indikator yang dihasilkan serta untuk menjalin koordinasi dan kolaborasi kegiatan statistik;
2. pengguna data, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk menangkap kebutuhan data mereka;
3. responden, untuk membangun hubungan baik serta untuk mengetahui tanggapan dan harapan mereka terhadap kegiatan statistik yang dilakukan.

Pemetaan para pemangku kepentingan SNPSI diharapkan sudah tersedia pada akhir tahun 2021. Dari hasil pemetaan stakeholders SNPSI, akan diketahui gap antara ketersediaan dan kebutuhan data untuk memenuhi Prioritas Nasional, indikator SDGs, maupun kebutuhan data lainnya.



Menjawab  
tantangan  
pemenuhan  
terhadap  
kualitas dan  
keberagaman  
data

Membangun  
kapasitas  
statistik  
di seluruh  
"rantai nilai  
statistik" untuk  
mendukung  
*Decision  
Support System*

## PENYIAPAN INFRA- STRUKTUR UNTUK PENERAPAN SNPSI

Salah satu sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi SNPSI adalah ketersediaan infrastruktur statistik. Infrastruktur statistik yang dibangun harus mempertimbangkan aspek integrasi Teknologi Informasi (TI) ke dalam proses statistik dalam rangka otomatisasi, standarisasi, pengelolaan data, analisis data, dan diseminasinya.

Tahapan yang dilakukan dalam rangka menyiapkan infrastruktur SNPSI adalah:

### ■ **Penyusunan SNPSI yang Dituangkan Dalam Regulasi**

Karena SNPSI merupakan strategi percepatan perwujudan SSN yang andal, maka penyusunan SNPSI diawali dengan analisis dan evaluasi terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan dalam penerapan SSN saat ini.

Penyusunan SNPSI ini akan berpedoman pada *National Strategy for the Development of Statistics (NSDS) Guidelines v2.3* yang diluncurkan oleh *Partnership in Statistics for Development in the 21st Century* (PARIS21).

SNPSI yang disusun memuat:

1. Visi SSN jangka menengah dan panjang;
2. *Road map* berisi kerangka teknis bagaimana strategi yang telah dipilih akan mewujudkan Visi SSN, termasuk penyusunan rencana aksi dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya;
3. Tata kelola, termasuk aturan mengenai interoperabilitas data serta keamanan dan kerahasiaan data individu.

Kemudian, SNPSI akan dituangkan ke dalam regulasi yang diharapkan selesai pada tahun 2022.

### ■ **Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur SNPSI**

Identifikasi ini akan dilakukan pada 2022 dan didasarkan pada strategi dalam SNPSI. Identifikasi ini harus mendukung interoperabilitas data, dengan tetap mengedepankan keamanan dan kerahasiaan data individu. Selain itu, infrastruktur yang dibangun juga harus mendukung sistem dan data yang terintegrasi guna meningkatkan kepuasan pengguna data dengan aksesibilitas pemanfaatan data yang tinggi.

### ■ **Desain dan Pembangunan Infrastruktur SNPSI**

Dari hasil identifikasi kebutuhan infrastruktur, kemudian dirancang dan dibangun infrastruktur statistik sebagai *enabler* penerapan SNPSI. Untuk mendukung otomatisasi, standarisasi, integrasi pengelolaan data, analisis yang lebih kompleks, dan peningkatan diseminasi data, perlu dibangun infrastruktur TI, yang mencakup: kebijakan dan standar TI, fasilitas TI (seperti *data center* dan *server*), serta personil TI yang kompeten untuk mengembangkan infrastruktur tersebut.



## PENINGKATAN LITERASI SNPSI KEPADA PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

Pembangunan statistik nasional tidak akan terselenggara dengan baik tanpa adanya sumber daya manusia yang kompeten di bidang statistik untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik. Peningkatan literasi mengenai SNPSI untuk mewujudkan SSN perlu dilakukan kepada seluruh *stakeholders*. Program peningkatan literasi ini akan dilakukan bertahap dan berkesinambungan yang rencananya akan dilakukan selama periode 2021 – 2024, dalam bentuk:

### Bagi Pemerintah (K/L/D/I)

1. Memberikan pembinaan bagi K/L/D/I penyelenggara kegiatan statistik untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral.
2. Kolaborasi antara pemerintah dan institusi pendidikan dalam rangka menyiapkan tenaga di bidang statistik maupun penanaman kesadaran pentingnya statistik/data melalui penyesuaian kurikulum pendidikan statistik mulai tingkat pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi.

### Bagi Masyarakat

1. Menyusun pesan dan konten untuk advokasi statistik yang disampaikan melalui berbagai media dan oleh berbagai pihak. Adanya proses advokasi statistik berkala yang selaras dengan proyek literasi statistik internasional, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman statistik masyarakat.
2. Mendorong para profesional penyelenggara kegiatan statistik untuk bergabung dan aktif dalam asosiasi profesional statistik (seperti Forum Masyarakat Statistik) sehingga profesionalisme dapat tumbuh dan berkembang.
3. Membangun dan menggunakan jaringan sosial untuk menyebarluaskan data dan informasi secara masif.
4. Media dapat memainkan peran penting dalam pembangunan statistik nasional, sehingga perlu diberdayakan untuk melaporkan dan menggunakan statistik inti dalam berita yang disampaikan.
5. Meningkatkan akses masyarakat terhadap data statistik maupun konsultasi statistik.



**Bentuk Peningkatan Literasi SNPSI**

## KOORDINASI DAN KOLABORASI ANTAR K/L/D/I SERTA PENETAPAN STANDAR DATA STATISTIK MENUJU IMPLEMENTASI SNPSI

Banyaknya data statistik yang tersebar dan belum terhubung di berbagai K/L/D/I merupakan tantangan dalam perumusan kebijakan nasional. Tidak terpadunya data dapat berdampak pada ketidaktepatan kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, integrasi data statistik antar K/L/D/I penyelenggara statistik mutlak diperlukan. Hal ini dapat tercapai melalui koordinasi dan kolaborasi serta standardisasi data statistik antar para penyelenggara statistik. Hal ini akan dilakukan secara bertahap pada periode 2021 – 2023.

### ■ Koordinasi & Kolaborasi Antar K/L/D/I

Koordinasi dan kolaborasi untuk mengatasi disintegrasi data ini dapat dilakukan melalui:

1. Pembentukan Dewan Statistik Nasional sebagai komite pengarah penyelenggaraan statistik nasional;
2. Pembentukan Forum Statistik yang bertujuan untuk identifikasi kebutuhan statistik, menentukan skala prioritas kebutuhan data, serta kolaborasi kegiatan statistik antar K/L/D/I;
3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan statistik yang dilakukan melalui wali data.

### ■ Penetapan Standar Data Statistik

Koordinasi dan kolaborasi yang baik antar penyelenggara statistik salah satunya akan bermuara pada keseragaman dalam penggunaan standar data dan metadata. Standardisasi pada data statistik dan metadata merupakan modal awal berbagi-pakai data. Penetapan standar data diatur dalam Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data, sedangkan metadata statistik diatur dalam Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik. Pemanfaatan TI untuk berbagi-pakai data juga diperlukan agar proses pertukaran data dapat dilakukan otomatis melalui komunikasi antarmesin.

**Dengan adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik antar K/L/D/I dan seluruh pemangku kepentingan dalam penerapan SNPSI, maka diharapkan akan tercapai SSN yang andal, efektif, dan efisien yang dilihat dari:**

1. Tersedianya data yang berkualitas dan beragam sesuai kebutuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan
2. Kemudahan dalam mengakses data, dengan tetap menjunjung tinggi keamanan dan kerahasiaan data sesuai aturan perundangan yang berlaku
3. Penyelenggara statistik dapat melaksanakan kegiatan statistiknya secara mandiri dan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku
4. Koordinasi dan kolaborasi antara penyelenggara statistik berjalan dengan baik
5. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya statistik



# TRANSFORMASI PROSES BISNIS STATISTIK

---

Integrasi survei serta pemanfaatan *big data* secara penuh dapat menjadi jalan untuk menghasilkan *official statistics* dan risiko beban kerja berlebihan serta *respondent burden*.

**Moh. Edy Mahmud**  
Deputi Bidang Neraca dan  
Analisis Statistik





Pemetaan Relevansi  
Survei untuk  
Mengevaluasi  
Relevansi  
Survei Terhadap  
Kebutuhan dan  
Kondisi yang  
Berkembang

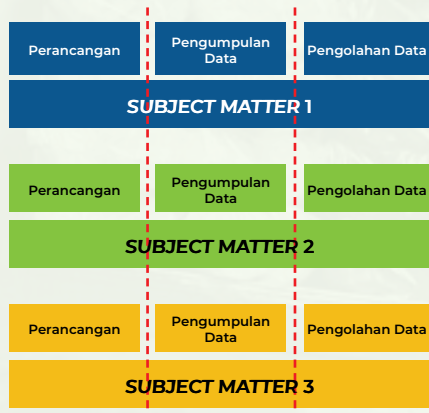


Integrasi Proses  
Bisnis Statistik  
untuk Mendukung  
Penyediaan  
Indikator bagi  
Kebutuhan  
Statistik Makro  
dan Neraca yang  
Berkualitas

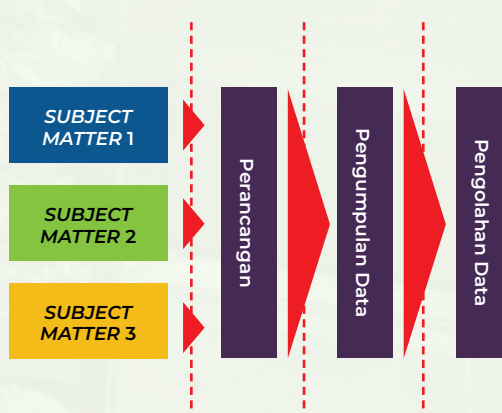


Pemanfaatan  
Berbagai Sumber  
*Big Data* dengan  
Maksimal untuk  
Menghasilkan  
*Official Statistics*

## Pendekatan Tradisional



## Pendekatan Terintegrasi



## Perubahan dari Pendekatan Tradisional ke Pendekatan Terintegrasi

Era disrupsi menuntut ketersediaan data yang akurat dengan tenggat waktu yang lebih cepat. Pemangku kepentingan dan masyarakat membutuhkan informasi terkini dan beragam setiap saat. Meningkatnya kepercayaan dan kebutuhan pemerintah dan masyarakat akan data ini tak pelak turut menambah tugas dan tanggung jawab BPS dalam penyediaannya. Saat ini kita semua merasakan, jumlah survei yang dilakukan dan variabel yang dikumpulkan semakin banyak dan beragam. Beban petugas dan beban responden di lapangan menjadi tantangan tak terelakkan. Oleh karena itu, BPS perlu menyederhanakan proses bisnis statistiknya untuk meminimalisasi kejenuhan responden saat pencacahan agar kualitas data tetap terjaga.

Di tengah keterbatasan sumber daya (manusia, anggaran, dan waktu) dan meningkatnya kebutuhan pengguna terhadap kualitas dan keberagaman data, BPS harus memanfaatkan semangat Reformasi Birokrasi dalam memperbaiki tata laksana proses bisnis statistiknya. BPS harus mampu bergerak dari proses bisnis statistik yang terkotak-kotak antar-*subject matter* (*silo*) menjadi proses bisnis statistik terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan kegiatan statistik. Selain itu, Revolusi Industri 4.0 juga harus dijadikan momentum untuk mengubah cara pengumpulan data dalam menghasilkan *official statistics*. Saat ini, *big data* merupakan salah satu sumber data potensial yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan *official statistics*.

Untuk menjawab isu terkait transformasi proses bisnis statistik, BPS menetapkan dua arah perubahan, yaitu:

1

Integrasi statistik yang akan diawali oleh pemetaan relevansi survei.

2

Pemanfaatan *big data* untuk *official statistics*.



“

**Kita harus berani membuat terobosan. Jangan rutinitas, jangan monoton. Harus selalu ada pembaharuan dan inovasi.**

Joko Widodo

”

## ■ PEMETAAN RELEVANSI SURVEI

Untuk mengawali proses integrasi statistik, perlu dilakukan pemetaan relevansi survei yang bertujuan untuk:

- Mengevaluasi relevansi survei-survei BPS antara lain terhadap kebutuhan pengguna internal dan eksternal, serta pemenuhan indikator SDGs maupun Prioritas Nasional.
- Mengetahui fisibilitas/ kelayakan integrasi survei dari aspek metodologi, konsistensi indikator yang dihasilkan, ketersediaan data yang mendukung kebutuhan utama dalam penyediaan data.
- Menjadi dasar penetapan skala prioritas survei.
- Memberikan masukan terkait survei-survei yang berpotensi untuk diintegrasikan misalnya dinilai dari kemiripan variabel yang dikumpulkan, kesamaan unit observasi, maupun tahapan proses bisnisnya.

Pemetaan relevansi survei harapannya dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara

data statistik yang dihasilkan masing-masing *subject matter* dengan kebutuhan data pada neraca nasional dan statistik makro. Dengan demikian, kebutuhan data statistik dari *subject matter* baik yang belum terpenuhi maupun yang tidak sesuai dapat dipetakan.

Pada Desember 2021 ditargetkan akan tersusun suatu kajian relevansi survei yang memuat:

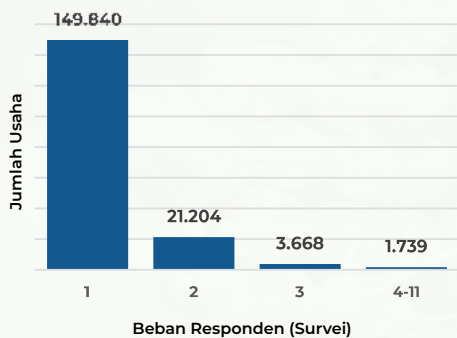
- Variabel yang tumpang tindih antar survei berbasis usaha.
- Kriteria standar untuk menentukan skala prioritas tiap survei.
- Gambaran aliran data statistik dari *subject matter* ke neraca.
- Indikasi awal survei-survei yang berpotensi untuk diintegrasikan ataupun direduksi.

Pemetaan relevansi untuk survei berbasis rumah tangga akan dilakukan pada tahun 2022. Dengan demikian, seluruh tahapan pemetaan relevansi survei akan selesai pada Juni 2022 agar dapat digunakan untuk perencanaan kegiatan statistik tahun 2023.



## INTEGRASI STATISTIK

Hasil Kajian Beban Responden Survei Berbasis Usaha menunjukkan bahwa pada tahun 2019, sebanyak 1.739 usaha (mayoritas usaha berskala menengah besar) menjadisampel pada 4–11 survei BPS. Hal ini berpotensi menimbulkan kejenuhan responden yang dapat berpengaruh terhadap kualitas data yang diberikan.



**Beban Responden Survei Berbasis Usaha Tahun 2019**

Untuk itu, percepatan integrasi statistik perlu segera dilakukan. Hal ini bertujuan untuk:

- Menjawab tuntutan pemenuhan data statistik berkualitas yang semakin beragam dan kompleks kepada BPS.
- Mengikis *silo* antar-*subject matter* sehingga diharapkan dapat membuat proses bisnis lebih efisien baik di pusat maupun di daerah.
- Menekan tingginya beban responden, terutama pada usaha berskala menengah besar.

Pada tahun 2021, beberapa hal dilakukan untuk mendorong implementasi integrasi statistik, antara lain:

- **Capacity building**  
Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman antar-*subject matter* mengenai konsep integrasi, maka Kedeputian NAS akan menyelenggarakan *e-learning* mengenai *System of National Accounts* (SNA) untuk tingkat dasar pada tahun 2021.
  - **Penyusunan tata kelola pelaksanaan integrasi statistik**  
Tata kelola pelaksanaan integrasi statistik akan disusun yang meliputi aturan, proses, pengelolaan, jadwal, target output, monitoring, dan evaluasi.
  - **Pemutakhiran *Statistical Business Register***  
SBR (berisi direktori usaha) harus dimutakhirkan secara berkala agar dapat digunakan sebagai kerangka sampel terintegrasi seluruh survei berbasis usaha.
  - **Economy-wide Survey (EWS)**  
Pada tahun 2021, akan dilakukan pengumpulan data EWS untuk kategori industri manufaktur di tiga provinsi: DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Pengolahan data EWS juga ditargetkan selesai pada tahun 2021.
- Steering Committee* lintas unit kerja yang dipimpin oleh Pimpinan Tinggi Madya akan dibentuk pada tahun 2022 yang bertugas memberikan input kepada Kepala BPS dalam memutuskan survei yang akan diintegrasikan.

EWS mengintegrasikan proses kerja dari hulu hingga ke hilir dalam menghasilkan data neraca nasional dan statistik makro yang berkualitas. EWS akan dijadikan acuan dalam melakukan integrasi kegiatan statistik yang memang berpotensi untuk diintegrasikan berdasarkan hasil pemetaan relevansi survei.

## PEMANFAATAN BIG DATA UNTUK OFFICIAL STATISTICS

BPS sebagai lembaga pemerintah yang menyediakan data statistik, telah ikut serta dalam pemanfaatan *big data* untuk *official statistics*. Dalam perjalanannya, masih banyak kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan *big data* untuk *official statistics*, di antaranya terkait kualitas, legalitas, klasifikasi yang digunakan, aksesibilitas, akuisisi data, dan kompleksitas *big data* yang tersedia. Ditambah lagi dengan belum adanya panduan resmi dari UN mengenai pemanfaatan *big data* untuk *official statistics*.



Untuk memaksimalkan pemanfaatan *big data* dari berbagai sumber *big data* untuk menghasilkan *official statistics*, beberapa hal yang BPS akan lakukan yaitu:

- Membangun prinsip - prinsip dasar dan proses bisnis yang standar.
- Membangun metodologi standar beserta perumusan metadatanya.
- Membangun infrastruktur pengelolaan dan pemanfaatan *big data*.
- Membangun kerjasama dengan K/L/D/I dan penyedia *big data* eksternal.

- Menyusun panduan penjaminan kualitas.
- Meningkatkan kapasitas SDM mengenai pengembangan *big data* dan kecerdasan artifisial.
- Menyusun peraturan-peraturan terkait, termasuk legalitas akses.
- Melakukan kajian pemanfaatan *big data* secara intensif dengan menerapkan tata kelola.
- Melakukan penyusunan naskah akademik rencana pembentukan unit kerja khusus pengembangan *big data*.

Pada penghujung tahun 2021, ditargetkan akan tersusun dokumen atau kajian mengenai:

- Kelayakan sumber-sumber *big data* yang dapat dimanfaatkan untuk *official statistics*.
- Prinsip-prinsip dasar yang standar dalam pemanfaatan *big data* untuk *official statistics*.
- Kebutuhan infrastruktur pengelolaan dan pemanfaatan *big data* untuk *official statistics*.

Dokumen tata kelola pemanfaatan *big data* untuk *official statistics* yang juga mencakup kerangka penjaminan kualitasnya, peningkatan kapasitas SDM di bidang pengembangan *big data* dan kecerdasan artifisial, dokumen peraturan yang mengatur legalitas akses pemanfaatan *big data* untuk *official statistics*, dan naskah akademik mengenai rencana pembentukan unit kerja khusus pengembangan *big data* diharapkan rampung pada tahun 2023. Sedangkan penyusunan publikasi hasil kajian pemanfaatan *big data* untuk *official statistics* yang dilakukan secara intensif dengan menerapkan tata kelola pemanfaatan *big data*, akan dimulai pada Januari 2023.



# PENGUATAN PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL

Menjawab tantangan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral dengan pembinaan yang kolaboratif dan inovatif ditunjang dengan infrastruktur statistik yang lengkap serta dimonitor dengan Indeks Pembangunan Statistik sebagai barometer kemajuannya

**Imam Machdi**  
Deputi Bidang Metodologi  
dan Informasi Statistik







Pembinaan dan  
Penyusunan Pedoman  
Statistik Sektorial



Sosialisasi dan  
Implementasi SDI




Pengembangan  
Infrastruktur Statistik



Penyusunan Standar  
Data Statistik dan  
Implementasi Regulasi  
Metadata Statistik



Monitoring dan Evaluasi  
Penyelenggaraan  
Kegiatan Statistik  
dengan Indeks  
Pembangunan Statistik

A man with short dark hair, smiling, wearing a dark suit, white shirt, and blue tie. He has his arms crossed and is standing in front of a background of server racks in a data center. A green horizontal bar is behind the text on the left.

Transformasi digital harus dilakukan tidak hanya di Deputi MIS, tapi menyeluruh di semua Deputi BPS pusat dan BPS daerah.



Pembinaan statistik sektoral merupakan salah satu bagian dari Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI) utamanya dalam mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI). Pembinaan statistik sektoral juga berperan besar terutama untuk menjalankan tugas BPS sebagai pembina data statistik di Indonesia salah satunya yaitu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral yang dijalankan oleh K/L/D/I. Selain itu, kompleksnya data yang ada saat ini menuntut kita untuk terus berinovasi dalam mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) Indonesia yang pada akhirnya akan menciptakan pembangunan nasional yang sistemik, lintas sektor, dan kolaboratif antar K/L/D/I.

Oleh karena itu, kami melihat bahwa perlu adanya rencana aksi terkait peningkatan literasi statistik melalui pembinaan statistik sektoral sebagai bentuk komitmen kita semua untuk mewujudkan visi misi BPS. Hasil dari rencana aksi pembinaan statistik sektoral yang kami harapkan tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas K/L/D/I terkait statistik, tetapi juga menyediakan kemudahan bagi K/L/D/I dalam penyelenggaraan statistik sektoral melalui penyediaan Standar Data Statistik, katalog data dan metadata yang sesuai struktur baku, kemudahan dalam mendapatkan rekomendasi, pengembangan infrastruktur statistik, serta instrumen monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan oleh seluruh K/L/D/I dalam pelaksanaan statistik sektoral masing-masing.



## PEMBINAAN DAN PENYUSUNAN PEDOMAN STATISTIK SEKTORAL UNTUK KUALITAS PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL YANG LEBIH BAIK

Kita menyadari bahwa penguatan SSN tidak mungkin bisa terwujud tanpa didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di bidang statistik. Saat ini, K/L/D/I belum memiliki SDM bidang statistik yang memadai untuk dapat menjalankan kegiatan statistik masing-masing. Oleh karena itu, peran kita sangat diperlukan sebagai pembina statistik sektoral.

Beberapa inisiatif untuk pembinaan statistik sektoral dilaksanakan pada tahun 2021 ini, seperti: pengembangan

*Learning Management System (LMS)* serta penyelenggaraan diklat statistik sektoral bagi K/L/D/I. Beberapa bentuk pengembangan LMS antara lain Warung Kompetensi (Warkop) BPS yang digunakan Pusdiklat BPS dalam penyelenggaraan pelatihan kompetensi baik manajerial maupun teknis serta aplikasi *e-learning* BPS sebagai media pembelajaran dalam bentuk pelatihan, *workshop*, ataupun *knowledge sharing* yang dapat diakses oleh eksternal BPS.

Dari teknis pelaksanaan diklat, BPS berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam menyusun materi pembelajaran. BPS juga mencoba menghadirkan fasilitator yang kompeten. Selain itu, diklat juga tidak hanya menargetkan SDM bidang statistik K/L/D/I, tetapi juga para produsen data, wali data, dan pembina data, dengan harapan dapat membangun pemahaman yang sama serta meningkatkan *awareness* dari semua pihak tentang pentingnya data statistik.

Selain melakukan pembinaan secara langsung dan berkelanjutan, BPS juga berkewajiban untuk menyediakan sumber-sumber rujukan yang dapat digunakan oleh berbagai K/L/D/I lainnya dalam penyelenggaraan statistik sektoral yang baik sesuai dengan kaidah statistik.

Oleh karena itu, kita akan menyediakan pedoman statistik yang menjelaskan secara detail tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral sehingga memenuhi prinsip





Satu Data Indonesia (SDI). Pedoman tersebut dapat menjadi acuan dalam proses pembagian pengetahuan serta dapat membantu fasilitator pembinaan statistik sektoral dalam mendesain materi pengajaran kepada peserta pembinaan dan diklat statistik sektoral.

Selain pedoman statistik sektoral, di tahun 2021 ini kami juga akan menyusun pedoman pendukung terbentuknya platform interkoneksi data antarsistem (interoperabilitas) serta mengembangkan fitur modul pembelajaran secara daring pada aplikasi *Romantik Online* untuk memudahkan keterlibatan wali data dalam pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral

“

Peningkatan kapasitas SDM K/L/D/I terutama dalam hal penyelenggaraan statistik menjadi salah satu fokus BPS sebagai pembina statistik sektoral.

”



## MENUJU SSN YANG ANDAL, EFEKTIF, DAN EFISIEN DENGAN SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI SDI

SDI merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar K/L/D/I melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Tidak dapat dimungkiri bahwa sampai saat ini, implementasi SDI yang merupakan salah satu instrumen pencapaian SSN belum sepenuhnya dilaksanakan oleh K/L/D/I.

Sebagai acuan dalam pelaksanaan SSN di Indonesia, BPS saat ini sedang menyusun rancangan Perpres SSN yang ditargetkan selesai di tahun 2021. Dalam jangka menengah dan panjang, rancangan perpres ini diharapkan dapat ditetapkan dan disosialisasikan baik di lingkup BPS maupun K/L/D. Harapannya, dalam jangka panjang SSN dapat diimplementasikan oleh penyelenggara statistik di Indonesia.

Sosialisasi terkait kebijakan dan tata kelola SDI serta pembinaan yang

bersifat tematik juga menjadi salah satu rencana aksi kami, baik di tahun ini maupun tahun-tahun berikutnya, untuk memperkuat pemahaman K/L/D/I tentang penyelenggaraan statistik. Selain itu, penerapan SDI secara umum juga perlu disosialisasikan melalui pemberian *technical assistance* penyelenggaraan kegiatan statistik.

Kami juga akan menyelenggarakan internalisasi Rekomendasi Kegiatan Statistik, baik di BPS pusat maupun BPS daerah agar kita semua dapat berperan aktif dalam proses pemberian rekomendasi di tahun 2021 ini. Tentunya komitmen kami, proses internalisasi ini akan terus dilaksanakan setiap tahunnya. Selain itu, bersama-sama kita sosialisasikan mekanisme rekomendasi kegiatan statistik kepada K/L/D/I sehingga mereka memberitahukan rancangan penyelenggaraan kegiatan statistiknya kepada BPS.

Regulasi Petunjuk Teknis Standar Data Statistik dan Petunjuk Teknis Metadata Statistik juga telah dituangkan dalam Peraturan BPS Nomor 4 dan 5 Tahun 2020 dan menjadi acuan bagi penyelenggara kegiatan statistik untuk menghasilkan data sesuai dengan prinsip-prinsip SDI. Tugas kita selanjutnya adalah menyosialisasikan kedua petunjuk teknis ini kepada instansi pemerintah sehingga data yang dihasilkan oleh produsen data memenuhi standar data dan memiliki metadata dengan format yang baku. Harapannya, data yang dihasilkan adalah data yang berkualitas yang mendukung program pembangunan pemerintah.





## PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR STATISTIK SEBAGAI PENDUKUNG PENYELENGGARAAN KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL

Pembinaan statistik sektoral tidak hanya sebatas peningkatan kapasitas K/L/D/I dalam melaksanakan kegiatan statistik sektoral, tetapi BPS juga berkewajiban memberikan kemudahan bagi K/L/D/I dalam menjalankan kegiatan statistik sektoral tersebut. Hal itulah yang mendorong BPS untuk membangun sebuah Infrastruktur Statistik yang akan membantu K/L/D/I menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral.

Beberapa modul dari Infrastruktur Statistik yang sedang dikembangkan dan ditargetkan selesai pada tahun 2021 ini di antaranya adalah:

### 1. Indonesia Data Hub (INDAH)

Saat ini kita sedang mengembangkan platform Satu Data yang kami sebut Indonesia Data Hub atau disingkat INDAH, yang menerapkan prinsip-prinsip SDI. Selain sebagai wadah kolaborasi dan eksplorasi data dari berbagai K/L/D/I dan big data, INDAH juga berfungsi sebagai media sosialisasi penerapan prinsip-prinsip SDI secara nyata.

### 2. Learning Management System (LMS)

BPS sedang mengembangkan *Learning Management System* (LMS) BPS saat ini sehingga dapat menjadi wadah peningkatan kapasitas K/L/D/I dalam menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral. LMS yang dikembangkan juga memungkinkan K/L/D/I untuk saling berkolaborasi dan berbagi.

### 3. Aplikasi Rekomendasi Statistik (ROMANTIK)

Dari sisi pelaksanaan statistik sektoral, tentu kita ingin memberikan kemudahan bagi K/L/D/I untuk mendapatkan rekomendasi pelaksanaan kegiatan statistik mereka. Saat ini, ROMANTIK sedang dikembangkan agar wali data terlibat dalam proses pengajuan rekomendasi kegiatan statistik K/L/D/I.

Harapan kami, dengan adanya modul-modul tersebut dapat menjadi kontribusi nyata BPS untuk memberikan gambaran konkret portal satu data yang menerapkan SDI secara komprehensif dan integratif, dan juga mempercepat proses terwujudnya SSN dan SDI.



**INDAH (Indonesia Data Hub)** sebagai *tool* orkestrasi data dari berbagai sumber dengan mempertimbangkan metadata dan standar data yang ada sehingga integrasi data pun dapat lebih mudah dilakukan dan diharapkan dapat meminimalkan data silo.

### Fitur-Fitur INDAH

- 1 Pengajuan, Persetujuan, Pemutakhiran, serta Pengaksesan Data dan Standar Data
- 2 Ajudikasi Metadata
- 3 Interoperabilitas Data dengan *Application Programming Interface*
- 4 Katalog Data
- 5 Pengelolaan Kode Referensi

## PENYUSUNAN STANDAR DATA STATISTIK DAN IMPLEMENTASI REGULASI METADATA STATISTIK

Untuk pemenuhan Prinsip SDI, BPS memiliki kewenangan untuk menetapkan Standar Data Statistik (SDS) dan kode referensi bidang statistik. Setiap tahunnya, kami berusaha melengkapi dan memperbarui Master File Standar Data Statistik (MFSDS) serta Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) yang dituangkan dalam regulasi yang jelas dan terukur. BPS akan menetapkan MFSDS tahun 2021 untuk mendukung kegiatan Sensus Pertanian (ST) 2023 sekaligus untuk mendukung produksi data prioritas nasional. Pemutakhiran MFSDS tahun 2021 juga melibatkan beberapa K/L lainnya.

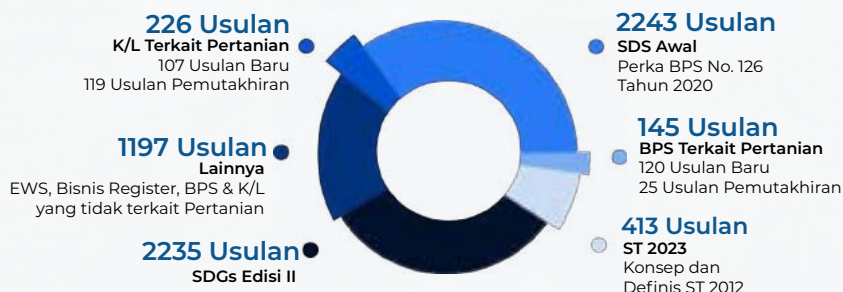
Sebagai sarana pendukung terkait SDS, sedang dikembangkan Platform Satu Data atau Indonesia Data Hub (INDAH), yang menjadi *one single system* yang menyediakan tata kelola SDS lintas instansi. Dalam INDAH, semua tahapan dalam pengelolaan SDS dicakup secara lengkap, baik untuk pengajuan usulan SDS baru maupun untuk pemutakhiran SDS.

Pada tahun 2021, BPS menetapkan KBJI 2021 dan Kami menargetkan di tahun 2021 ini telah tersedia regulasi kode referensi KBJI yang mutakhir.

Proses penyusunan KBJI 2021 dilakukan dengan proses yang komprehensif dan melibatkan banyak pihak terkait. Ini adalah wujud komitmen kami untuk terus memperbarui data klasifikasi jabatan di Indonesia.

Selain penyusunan regulasi terkait MFSDS, saat ini kita juga sedang berada di tahap implementasi penyediaan metadata sesuai struktur baku yang sejalan dengan Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 yang menjelaskan petunjuk teknis mengenai metadata statistik.

Setelah terbitnya regulasi tentang metadata statistik, Kami menginginkan di tahun 2021 ini metadata statistik yang sesuai struktur baku telah diimplementasikan sesuai dengan regulasi yang ada. Saat ini kami telah berupaya melakukan koordinasi penyusunan metadata statistik baik di internal BPS maupun dengan pihak eksternal K/L/D/I. Selain itu, diperlukan proses penyusunan metadata oleh produsen data dan dilanjutkan dengan perekaman metadata statistik pada *website* metadata. Seluruh proses ini tentunya membutuhkan komitmen bersama demi menghasilkan metadata yang semakin berkualitas.



Rekap Sumber Data Dalam Penyusunan MFSDS tahun 2021



## ■ MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN STATISTIK DENGAN INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK

Salah satu ciri pemerintahan berkelas dunia adalah seluruh kebijakan yang diambil harus berlandaskan pada data dan informasi yang berkualitas. Oleh karena itu, sudah menjadi suatu kebutuhan bahwa kegiatan perstatistikan di setiap K/L/D/I perlu dimonitor capaiannya. Untuk itu, kami mengharapkan adanya instrumen untuk evaluasi dan monitoring penyelenggaraan statistik khususnya untuk K/L/D/I.

Kami menyadari bahwa BPS harus mengusulkan untuk memasukkan sebuah indikator sasaran makro dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 Nasional, yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan statistik, serta mengukur *outcome* dari kegiatan perstatistikan nasional. Indikator tersebut akan diberi nama Indeks Pembangunan Statistik (IPS).

Penyusunan instrumen IPS sudah mulai dilakukan di tahun 2021 dengan melakukan identifikasi terhadap cakupan dimensi yang akan diukur dalam IPS, daftar pertanyaan/indikator tiap dimensi tersebut dan membuat timeline untuk implementasi IPS.

Selanjutnya instrumen IPS ini akan dilakukan uji coba terlebih dahulu ke beberapa K/L/D/I. Selain dari sisi teknis penyusunan instrumen IPS, kita juga harus menyiapkan draf peraturan terkait IPS serta akan disosialisasikan ke K/L/D/I secara luas dan bertahap. Dalam jangka panjang, IPS akan digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan statistik di lingkup K/L/D/I.



Di tahun 2021 ini, target penyusunan IPS adalah BPS dapat menyediakan suatu instrumen yang telah diuji coba serta adanya draf peraturan terkait IPS, selain itu IPS juga dapat tersosialisasi ke K/L/D/I secara luas dan bertahap. Harapannya, IPS beserta kelengkapan draf peraturan ini dapat diajukan ke Kementerian PANRB untuk dapat dijadikan instrumen makro sebagai salah satu ukuran Reformasi Birokrasi yang mengukur tingkat capaian K/L/D/I dalam aspek transparansi dan profesionalitas penyelenggaraan kegiatan statistik pemerintahan. Peningkatan kualitas pembangunan statistik pada gilirannya akan mendorong K/L/D/I dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan efisien.





# ADAPTASI TATA KERJA ERA BARU

Pola kerja baru dilakukan dengan lebih menekankan pada output dari hasil kerja kolaboratif serta dapat dilakukan pada lingkungan kerja yang fleksibel. Pemanfaatan teknologi dioptimalkan untuk proses kerja dan monitoringnya, sehingga walaupun fleksibel tetap menghasilkan output sesuai target.

**M. Habibullah**  
**Deputi Bidang Statistik**  
**Produksi**




Regulasi hubungan kerja baru



Ruang kerja yang fleksibel (*Flexible Working Space/FWS*)



Sistem Otomatisasi Perkantoran (*Office Automation System / OAS*)



Dalam Sistem Statistik Nasional (SSN), salah satu bentuk koordinasi antara BPS dengan instansi pemerintah penyelenggara kegiatan survei statistik adalah melalui mekanisme pemberian rekomendasi kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh BPS selaku Pembina Statistik Sektoral. Tujuan pemberian rekomendasi kegiatan statistik ini adalah agar tidak terjadi duplikasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, mendorong

Untuk mempermudah dan mempercepat birokrasi dalam memperoleh data berkualitas diperlukan tata kerja baru yang mengakomodir perubahan kebijakan dan kemajuan teknologi informasi.



diperolehnya hasil penyelenggaraan kegiatan statistik yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan, mewujudkan SSN yang andal, efektif dan efisien, serta menyediakan metadata statistik yang menjadi pusat rujukan penyelenggaraan kegiatan statistik di Indonesia.

Terlaksananya penyederhanaan organisasi dan penyetaraan jabatan membuat budaya dan ekosistem kerja perlu disesuaikan. Sumber daya manusia dan anggaran tidak lagi terkotak-kotak. Pola hubungan kerja menjadi lebih fleksibel dan kolaboratif. Ruang kerja diatur untuk mendukung fleksibilitas bekerja dan pemanfaatan teknologi yang lebih luas.

Tata kerja baru diharapkan dapat menghasilkan data-data statistik yang lebih berkualitas.

Untuk mempermudah dan mempercepat birokrasi dalam memperoleh data berkualitas diperlukan tata kerja baru yang mengakomodir perubahan kebijakan dan kemajuan teknologi informasi.

## Tata Kerja Baru sebagai Penopang Data Statistik Berkualitas



## REGULASI POLA HUBUNGAN KERJA BARU

Penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional memerlukan panduan atau peraturan terkait pola hubungan kerja yang baru. Hal ini menjadi sangat penting karena BPS merupakan instansi vertikal dengan banyak satuan kerja, mulai dari pusat, provinsi, sampai dengan kabupaten/kota, yang memerlukan keseragaman dalam pelaksanaan kegiatan.

Sebagai langkah awal, BPS telah membuat Peraturan BPS tentang Organisasi dan Tata Kerja. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS serta Peraturan BPS Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. Selanjutnya, perlu disusun regulasi terkait pola hubungan kerja. Pola hubungan kerja baru tidak hanya mengatur hubungan/koordinasi secara vertikal, tetapi juga mengatur koordinasi secara horizontal maupun diagonal. Secara vertikal adalah hubungan/koordinasi kerja antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Sedangkan secara horizontal adalah hubungan/koordinasi antar unit kerja di satuan kerja. Sementara itu, secara diagonal adalah hubungan/koordinasi antara Struktural dan Fungsional.

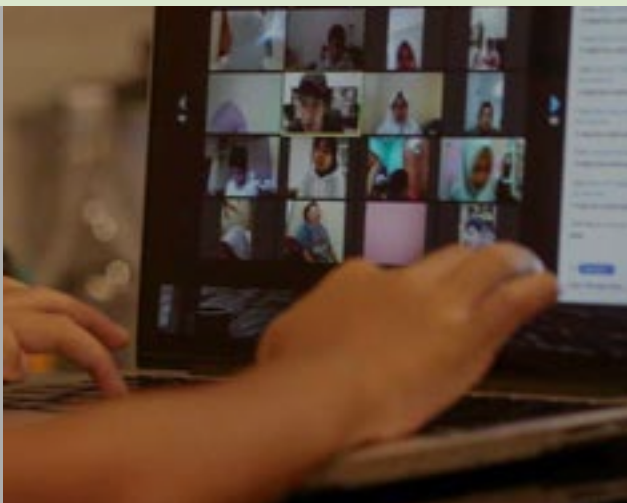
Dalam penyusunan regulasi pola hubungan kerja yang baru, akan dibentuk tim kerja yang tugas utamanya adalah mengkaji berbagai literatur, menganalisis masukan dari berbagai pihak, dan *benchmarking* terhadap kementerian/lembaga lain. Pola hubungan kerja baru

akan dituangkan dalam Peraturan Kepala BPS dan untuk kemudian diterapkan pada seluruh satuan kerja di lingkungan BPS. Dalam jangka pendek, pola hubungan kerja baru akan diinternalisasikan kepada seluruh pegawai BPS sampai akhir tahun 2021.

Dengan adanya regulasi pola hubungan kerja baru yang fleksibel dan kolaboratif serta birokrasi yang lebih ringkas, diharapkan dapat memicu pegawai BPS untuk dapat bekerja lebih efektif dan efisien guna menghasilkan data statistik yang lebih berkualitas.







## ■ RUANG KERJA YANG FLEKSIBEL (*FLEXIBLE WORKING SPACE/ FWS*)

Dalam era VUCA (*volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity*), situasi dunia mengalami perubahan sangat cepat dan cenderung tidak bisa ditebak. Contoh terbaru adalah adanya penyederhanaan organisasi dan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Selain itu, adanya Pandemi Covid-19 juga menuntut kita untuk tetap bekerja walaupun tidak bisa hadir di kantor.

Untuk menghadapi situasi seperti ini, perlu dilakukan terobosan bagi organisasi, salah satunya dengan menerapkan Ruang Kerja yang fleksibel (*Flexible Working Space/FWS*) sebagai *new normal*. FWS adalah pengaturan pola kerja pegawai yang memaksimalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan dan menjaga produktivitas pegawai serta menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas dengan memberikan fleksibilitas lokasi kerja

selama periode tertentu. Terobosan ini dibuat agar pegawai BPS bekerja tidak hanya berdasarkan produktivitas dan kesesuaian dengan tugas dan fungsi, tetapi bagaimana pegawai dapat mengerjakan pekerjaan dengan efektif dan efisien tanpa tergantung tempat bekerja.

Implementasi FWS ini akan mempertimbangkan pemetaan jenis-jenis pekerjaan yang dapat dilakukan secara remote dan pekerjaan yang harus dilakukan di kantor, penyusunan proses bisnis dan kalibrasi analisis beban kerja. Pengukuran kinerja pegawai dan atau target kinerja unit kerja juga penting dalam implementasi FWS.

Regulasi tentang implementasi ruang kerja yang fleksibel (FWS) khususnya jenis pekerjaan, indikator pegawai prioritas, dan mekanisme usulan pelaksanaan di lingkungan BPS diharapkan sudah dituangkan dalam Peraturan Kepala BPS dan dapat disosialisasikan pada akhir tahun 2021. Ke depan, FWS dapat diterapkan dan jumlah pegawai yang mendapat prioritas untuk bekerja dari manapun semakin banyak secara bertahap.

Dengan adanya regulasi ruang kerja yang fleksibel serta dilengkapi dengan infrastruktur yang baik, Kita dapat bekerja lebih nyaman dengan tetap menjaga kualitas data statistik.




## SISTEM OTOMATISASI PERKANTORAN (*OFFICE AUTOMATION SYSTEM/OAS*)

Dalam menerapkan Ruang Bekerja yang Fleksibel (FWS) perlu ditunjang dengan infrastruktur yang memadai berupa Sistem Otomatisasi Perkantoran (*Office Automation System/OAS*). OAS adalah sistem yang memfasilitasi tugas pemrosesan informasi di dalam perkantoran dan organisasi bisnis. Secara umum, pengotomatisan perkantoran adalah upaya memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada dan menerapkannya dalam perkantoran dengan tujuan memudahkan penyelesaian pekerjaan. Contoh OAS yang telah diterapkan BPS, di antaranya aplikasi *Meetapp* untuk menyiapkan *Zoom Meeting*, *Chatbot Website BPS* untuk pengguna data, dan *HaloSIS* sebagai pusat layanan teknologi informasi di BPS. Dengan adanya OAS, pengerjaan tugas menjadi lebih cepat serta fleksibel, terutama di masa pandemi saat ini.



Agar OAS dapat berjalan optimal, perangkat (desktop/laptop) dan aplikasi-aplikasi yang digunakan juga harus optimal, baik untuk keperluan pekerjaan pribadi maupun pekerjaan tim. Perangkat dan aplikasi-aplikasi yang digunakan harus bebas virus dan juga berlisensi. Selain itu, para pegawai juga perlu diberikan pelatihan aplikasi umum yang digunakan untuk kebutuhan tim.

Ke depan,  
OAS yang  
terintegrasi  
atau sederhana  
dapat  
dibangun dan  
dikembangkan.  
Selanjutnya,  
dapat  
digunakan oleh  
seluruh Satker  
secara bertahap



Dengan Sistem Otomatisasi Perkantoran (*Office Automation System/OAS*), Kita dapat berkoordinasi dimanapun dan kapanpun secara efektif, efisien dan berkualitas.

OAS dalam bentuk parsial sudah tersedia di BPS saat ini seperti *Back Office*, Simotik dan aplikasi-aplikasi layanan perkantoran lainnya, namun belum terintegrasi. Perlu kajian untuk pengintegrasian dan pengembangannya agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Kajian terhadap OAS yang terintegrasi/sederhana diharapkan akan tersedia pada akhir tahun 2021. Ke depan, OAS yang terintegrasi dan sederhana dapat dibangun dan dikembangkan. Selanjutnya, dapat digunakan oleh seluruh Satuan Kerja secara bertahap.

Dengan Sistem Otomatisasi Perkantoran (*Office Automation System/OAS*), kita dapat berkoordinasi di manapun dan kapanpun secara efektif, efisien, dan berkualitas.



# MENCETAK SDM BPS YANG UNGGUL

Program penempatan dan mutasi SDM BPS akan didasarkan pada kebutuhan masa depan organisasi. HC DP menjadi dasar dalam eksplorasi potensi pegawai, yang hasilnya dapat digunakan sebagai sumber informasi manajemen talenta. Pada akhirnya, BPS dan pegawainya akan mendapatkan benefit yang maksimal.





Pemenuhan  
SDM Teknis dan  
Nonteknis



Mutasi pegawai  
dalam rangka  
pemenuhan  
kebutuhan  
organisasi



Eksplorasi Talenta  
dan Maksimalisasi  
Potensi Pegawai



Formasi pegawai  
berdasarkan hasil  
ABK terbaru

## PEMENUHAN SDM TEKNIS DAN NONTEKNIS

Pengembangan karier lulusan STIS diarahkan tidak hanya pada bidang teknis (statistika) tetapi juga pada bidang nonteknis.

Saat ini kebutuhan pegawai BPS dipenuhi melalui lulusan Politeknik Statistika STIS (Polstat STIS). Dalam memenuhi tenaga teknis, mekanisme PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru) Polstat STIS akan mempertimbangkan formasi kebutuhan BPS hingga level kabupaten/kota menggunakan pendekatan afirmasi. Perubahan mekanisme ini akan diterapkan pada PMB 2022 sehingga tata kelola dan regulasi yang mendukungnya segera diselesaikan di akhir 2021.

Di sisi lain, untuk pemenuhan tenaga nonteknis, seperti tenaga analis anggaran, analis hukum dan lain-lain, salah satu solusinya adalah dengan penerapan kebijakan mutasi lintas fungsional yang disesuaikan dengan aturan kepegawaian yang berlaku dengan kepastian durasi masa kerja pada jabatan yang dibutuhkan. Sedangkan solusi jangka menengahnya dengan pengembangan karier lulusan Polstat STIS yang diarahkan tidak hanya pada bidang teknis, tetapi juga pada bidang nonteknis. Peningkatan kompetensi bidang nonteknis dapat ditunjang oleh berbagai diklat yang diselenggarakan oleh Pusdiklat berdasarkan kebutuhan organisasi yang merujuk pada Kepka Nomor 281 mengenai ABK terbaru.

Selain pengembangan SDM yang sudah ada, penerimaan CPNS umum juga akan dilaksanakan. Perekrutan

CPNS ini harus berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sehingga peran pimpinan dalam pengusulan kebutuhan CPNS umum (non statistisi) sangat dibutuhkan. Setidaknya BPS membutuhkan sekitar 2.000 (dua ribu) tenaga nonteknis untuk 517 unit kerja dalam 4 tahun ke depan. Dalam berkoordinasi dengan Kemenpan-RB, tentunya pimpinan perlu didukung oleh data proyeksi kebutuhan CPNS non statistisi dari Biro SDM. Opsi solusi lain adalah melakukan koordinasi dengan Kementerian PANRB terkait pemenuhan formasi nonteknis di BPS. Hal ini harus didukung dengan informasi yang memadai terkait peta kompetensi, Analisis Beban Kerja (ABK), dan Analisis Jabatan (Anjab). BPS telah melakukan ABK dan Anjab pada awal tahun 2021. Targetnya tahun 2022 akan disahkan dalam bentuk regulasi.

Langkah alternatif lain ditempuh dengan menjalin kerja sama untuk pemenuhan kompetensi nonteknis, seperti pertukaran alumni kedinasan lain dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh organisasi. Beberapa telah dilakukan, seperti kerja sama dengan Kementerian Keuangan melalui Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN), dan penerimaan pegawai jalur lolos butuh.

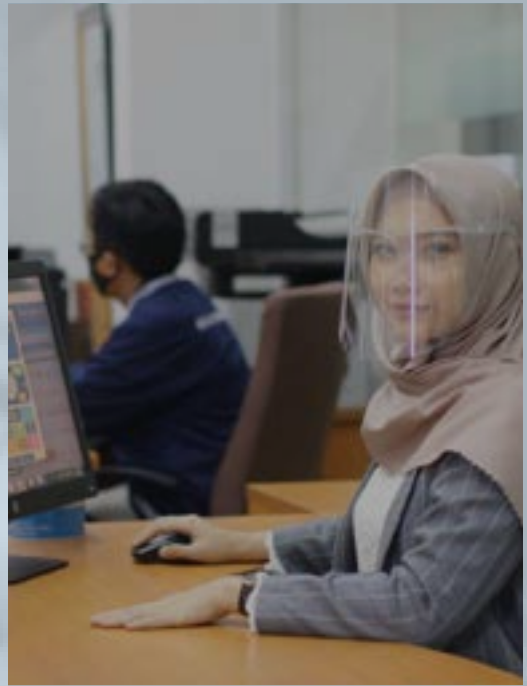
## MUTASI PEGAWAI DALAM RANGKA PEMENUHAN KEBUTUHAN ORGANISASI

Penempatan pegawai sesuai formasi dan kebutuhan instansi merupakan salah satu mekanisme yang diperlukan dalam pengelolaan SDM di BPS. Penempatan dan pemindahan pegawai harus memenuhi persyaratan tertentu seperti kebutuhan pegawai, standar kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan di satuan organisasi yang akan dituju, prestasi kerja yang baik berdasarkan penilaian sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja, serta tidak sedang dalam proses penyelesaian pelanggaran disiplin tingkat hukuman sedang atau berat.

Pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan keahlian yang dimiliki akan cenderung menghasilkan output kinerja yang lebih baik sehingga *right man on the right place* akan tercapai.

Penetapan peraturan baru tentang pola penempatan dan pemindahan pegawai akan meningkatkan objektivitas, transparansi, perencanaan karier, dan motivasi kerja pegawai. Saat ini hal tersebut diatur dalam Perka BPS No.6 dan 38 tahun 2013.

**Penetapan peraturan baru tentang pola penempatan dan pemindahan pegawai akan meningkatkan objektivitas, transparansi, perencanaan karier, dan motivasi kerja pegawai.**



Menyikapi dinamika SDM aparatur seperti penyederhanaan proses pekerjaan dan perpindahan jabatan dari struktural menjadi fungsional telah dilakukan. Penyederhanaan proses pekerjaan dapat berimplikasi pada proses mutasi pegawai seperti kebijakan jabatan fungsional muda ke bawah dalam satu provinsi dapat dikelola langsung oleh BPS Provinsi.

Hal ini perlu dilakukan atas dasar pemahaman kebutuhan masing-masing BPS Provinsi. Sehingga pada akhir tahun 2021 hal tersebut sudah dapat ditindaklanjuti



## EKSPLORASI TALENTA DAN MAKSIMALISASI POTENSI PEGAWAI

BPS telah memotret dan memetakan sebaran kompetensi seluruh pegawai di tahun 2015. Selanjutnya, dilakukan *assessment* pada tahun 2018 bersamaan dengan pengukuran kinerja melalui Performa 360 di tahun yang sama. Langkah tersebut menjadi modal utama kami dalam menata manajemen talenta, karena menempatkan pegawai sesuai kompetensi dan bakatnya menjadi harapan kami dalam membentuk pola karier di lingkungan BPS.

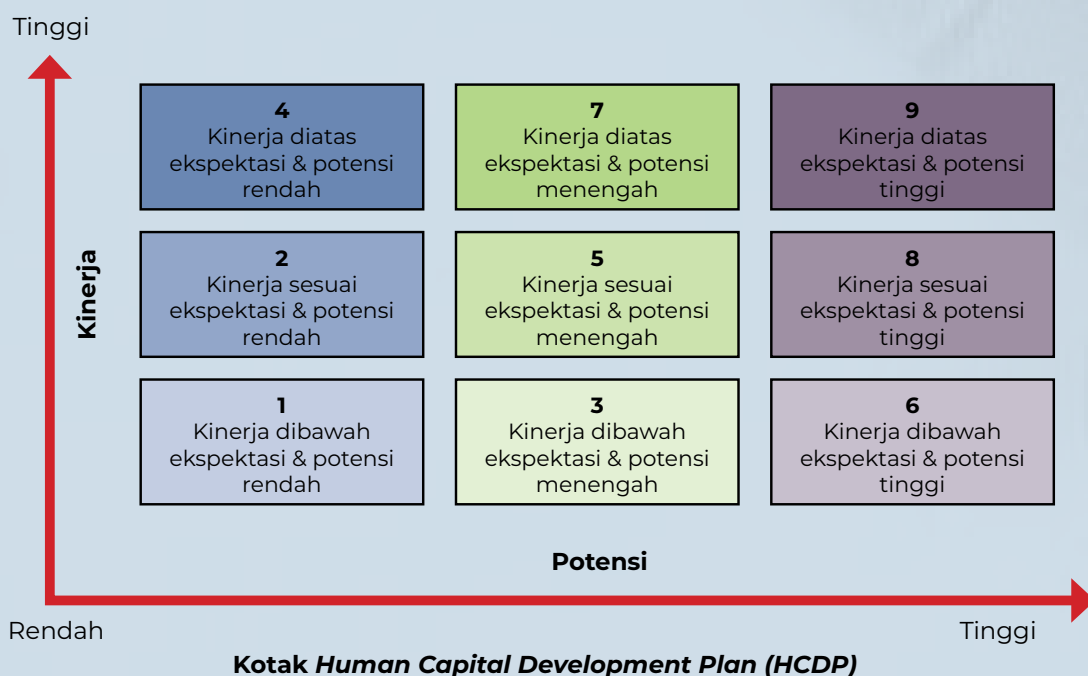
Dari kotak *Human Capital Development Plan* (HCDP) berikut ini, pemetaan pegawai ditempatkan pada 9 kotak *talent* yang merupakan kombinasi dari kompetensi dan kinerja. *Talent* berada pada kotak 7, 8, dan 9 sedangkan kotak 4, 5, dan 6 potensial untuk dikembangkan menjadi *talent*. Jangka pendeknya, HCDP akan dipetakan untuk Madya dan Eselon III, dan jangka panjangnya

kepada seluruh pegawai BPS.

Dengan melihat peta kompetensi dan *gap* yang muncul, HCDP dapat dijalankan secara efektif. Pada akhirnya, BPS akan memiliki kandidat suksesi dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang tinggi.

HCDP harus memiliki *benefit* bagi pegawai maupun manajemen pengelola SDM, salah satunya peningkatan kapabilitas hingga pencarian lingkungan kerja yang lebih sesuai dengan talenta pegawai. Dengan kata lain, implementasi HCDP akan menunjang karier pegawai.

Dan yang terpenting, setiap pegawai paham dan sadar bahwa setiap usaha dan pekerjaannya memberikan *impact* pada BPS. Manajemen talenta di BPS akan mencetak calon pemimpin BPS yang mengedepankan kerja sama tim yang dinamis, cepat, tepat, cerdas, inovatif, dan kolaboratif.



## FORMASI PEGAWAI BERDASARKAN HASIL ABK TERBARU

Sesuai amanat UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), setiap instansi pemerintah wajib menyusun Anjab dan ABK guna menentukan kebutuhan jumlah serta jenis jabatan PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal ini dikuatkan dengan Permenpan RB nomor 1 tahun 2020 mengenai Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

Sebagai bagian lembaga negara, BPS juga melakukan Anjab dan ABK yang sudah ditetapkan melalui Keputusan Kepala (Kepka) BPS nomor 281 tahun 2021.

Hasil dari Anjab dan ABK tersebut adalah penetapan formasi kebutuhan pegawai, baik di BPS pusat maupun daerah.

Isu/permasalahan saat ini adalah distribusi pegawai yang belum merata. Sebagai contoh, berdasarkan ABK terbaru formasi fungsional tertentu di Papua Barat tersedia, namun pegawai tidak mencukupi, sedangkan di Jawa Timur SDM lebih besar dibanding formasi yang tersedia.

Hal ini menandakan bahwa penempatan dan pola rotasi pegawai BPS perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, untuk dapat menyelesaikan



Jangka panjang penerapan kebijakan ini akan mengatasi permasalahan kesenjangan pegawai di wilayah Indonesia Barat dan Timur

permasalahan di hilir ini perlu dilakukan kebijakan. Salah satu kebijakan yang dapat diambil adalah dengan membatasi jumlah pegawai di suatu unit kerja maksimal 70 persen dari jumlah total kebutuhan pegawai.

Dalam jangka pendek (akhir 2021), output yang diharapkan untuk mendukung kebijakan ini di antaranya melakukan realokasi dan pemetaan pegawai sesuai dengan ABK pada Kepka BPS nomor 281 tahun 2021.

Kemudian diterbitkan surat yang menginformasikan formasi yang ada di setiap unit kerja secara terbuka. Kebijakan tersebut ditunjang juga dengan program rotasi yang diatur dalam regulasi manajemen karier yang ditargetkan selesai tahun 2022.



Kepka No 281 Tahun 2021 tentang Rekapitulasi Jabatan Hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan BPS Tahun 2021 telah disahkan

# KINERJA TERPADU UNTUK BPS BERKELAS DUNIA

Indikator kinerja harus dibuat jelas sampai level individu yang berorientasi pada output/hasil. Pada penerapannya akan dibangun regulasi dan sistem manajemen kinerja yang kemudian disosialisasikan kepada seluruh SDM BPS untuk menciptakan iklim kerja yang produktif dan kolaboratif

**Setianto**  
Deputi Bidang Statistik  
Distribusi dan Jasa





*Cascading*  
(Penyelarasan)  
Indikator Kinerja  
Secara Vertikal  
sampai Level  
Jabatan Terendah



Menuju  
Indikator Kinerja  
yang Berorientasi  
pada *Output/Hasil*



Internalisasi Target  
Indikator Kinerja



Penyesuaian  
Sistem  
Manajemen  
Kinerja dengan  
Peraturan  
yang Berlaku



“

## Kinerja yang Jelas akan membuat BPS Makin Berkelas

”

Peningkatan kualitas manajemen SDM perlu dibarengi dengan kejelasan kinerja dari setiap pegawai. Oleh karena itu, indikator kinerja organisasi harus dapat terpetakan dan terbagi habis ke dalam kinerja setiap pegawai sesuai jabatannya. Indikator kinerja juga akan berbasis kepada hasil kerja yang dibingkai dalam sistem manajemen kinerja berdasarkan peraturan yang berlaku secara nasional.

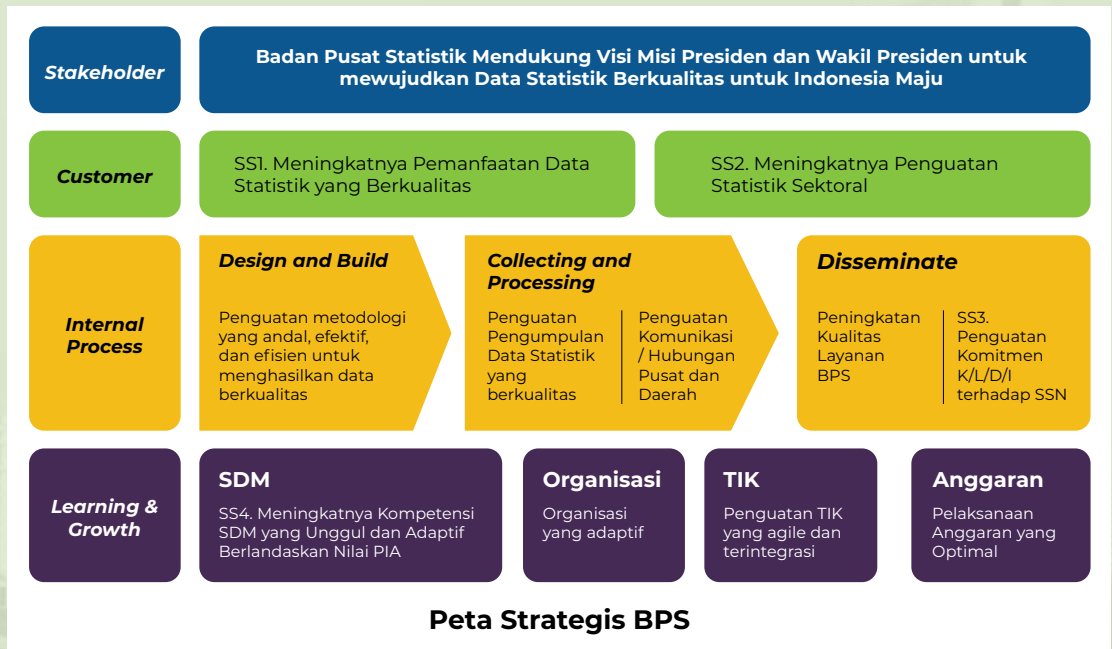
Pengelolaan kinerja organisasi yang tepat memerlukan penjabaran visi misi dan sasaran strategis agar lebih operasional dan implementatif. BPS telah menjabarkan indikator kinerja secara berjenjang, yaitu dari level BPS *wide* (organisasi) sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis BPS 2020-2024, level eselon 1, level eselon 2 sampai dengan BPS provinsi dan BPS kabupaten/kota. Namun demikian, penyusunan

indikator kinerja di BPS Daerah selama ini hanya menurunkan dari indikator BPS Pusat karena minimnya sosialisasi mengenai penyusunan indikator tersebut ke BPS Daerah.

Di sisi lain, berdasarkan hasil penjabaran visi, misi, dan sasaran strategis BPS, masih perlu dilakukan penajaman pada beberapa aspek peta strategis BPS 2020-2024, antara lain:

1. Perspektif *Internal Process*, yaitu secara proses bisnis BPS, sasaran strategis belum menggambarkan dukungan terhadap *outcome* BPS.
2. Perspektif Sumber Daya, di mana peta strategis BPS belum dapat digambarkan secara optimum dan belum ada penyelarasan *cascading* antara indikator kinerja organisasi dengan indikator kinerja unit-unit kerja di bawahnya.

Selain 2 (dua) aspek tersebut, salah



salah satu permasalahan yang sedang dihadapi BPS adalah tidak standarnya penggunaan indikator dan metadata dalam kegiatan BPS.

Oleh karena itu, ada beberapa rencana aksi yang kami pandang perlu dilakukan dalam rangka untuk mengakselerasi proses pencapaian tujuan BPS, yaitu antara lain merevisi kembali Renstra BPS 2020-2024 dan bahkan merevisi bila diperlukan

dengan lebih menajamkan lagi sasaran strategis dan indikatornya pada masing-masing perspektif sehingga keterkaitan antar sasaran dan indikator yang disusun dapat terlihat dengan baik. Dari hasil revisi Renstra ini kemudian dilanjutkan dengan menyelaraskan kembali sasaran strategis pada masing-masing Renstra di lingkungan eselon 1 BPS, dan selanjutnya menyelaraskan sasaran dan indikator pada Renstra level eselon 2 baik pusat maupun daerah.

Agar penyelarasan dapat terwujud tentunya kami memandang perlu untuk menyusun terlebih dahulu pedoman revidi dan revisi Renstra, sehingga terdapat persamaan persepsi dalam pelaksanaan revisi Renstra. Harapan kami, dengan adanya rencana aksi tersebut maka akan dapat memudahkan semua pihak yang berkepentingan dalam melakukan pengelolaan kinerjanya termasuk pengelolaan kinerja di level BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota.



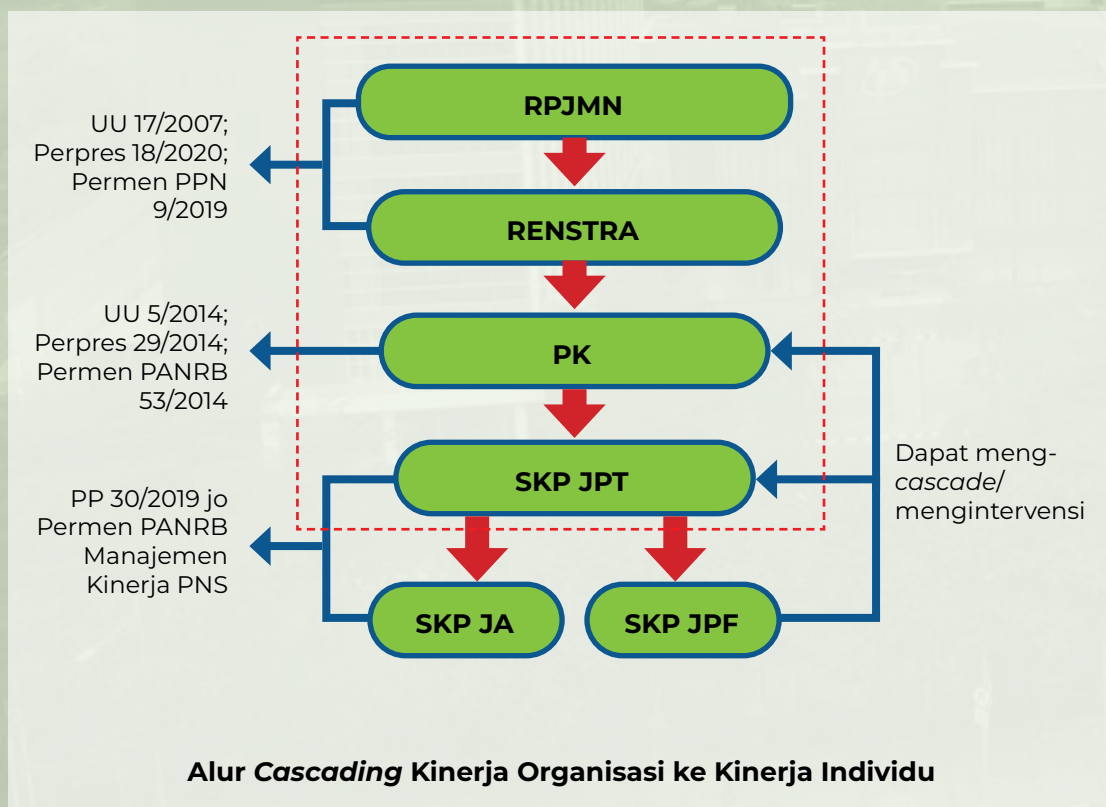


## CASCADING (PENYELARASAN) INDIKATOR KINERJA SECARA VERTIKAL SAMPAI LEVEL JABATAN TERENDAH

Indikator kinerja di lingkungan BPS saat ini tertuang dalam Peraturan Kepala BPS Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024, namun baru dituangkan sampai dengan level Jabatan Pimpinan Tinggi.

Idealnya indikator kinerja tersebut perlu dijabarkan dan diselaraskan secara berjenjang sampai level jabatan administratif dan jabatan fungsional sesuai dengan Permenpan RB Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang alur *cascading* kinerja organisasi ke dalam kinerja individu.

Berdasarkan alur proses *cascading* kinerja tersebut untuk menjabarkan kinerja sampai level terendah, BPS akan menerjemahkan visi dan misi secara berjenjang sampai jabatan terendah berdasarkan lingkup tugas dan fungsinya dengan melakukan reviu Perka mengenai indikator kinerja. Secara paralel BPS juga mempelajari Renstra dan IKU dari K/L lain sebagai referensi dan *best practice*. Selanjutnya, akan disusun pedoman standar penyusunan Rencana Strategi BPS yang baru yang akan digunakan untuk melakukan proses *cascading* kinerja di BPS. Dari hasil *cascading* tersebut akan dilakukan evaluasi





untuk menjamin keselarasan antara indikator kinerja individu dengan visi dan misi BPS.

Untuk mewujudkannya BPS akan melakukan proses *cascading* kinerja yang diawali dari penurunan RPJMN ke renstra badan/organisasi. Selanjutnya penjabaran Renstra tersebut dituangkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Setelah IKU terbentuk, kemudian akan dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK). Berdasarkan PK ini, akan dilakukan *cascading* ke bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

level individu berjenjang mulai dari Jabatan Pimpinan Tinggi (SKP JPT) hingga ke SKP Jabatan Administratif (SKP JA) dan SKP Jabatan Fungsional (SKP JF).

Oleh karena itu, sebagai pedoman untuk melakukan *cascading* kinerja di BPS kami akan menyusun petunjuk teknis tata cara *cascading* dan penyusunan indikator kinerja yang ditargetkan akan selesai pada akhir tahun 2021 sehingga diharapkan proses *cascading* kinerja akan terstandarisasi.



## MENUJU INDIKATOR KINERJA YANG BERORIENTASI *OUTPUT*/HASIL

Sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintah yang berorientasi pada hasil, BPS juga dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan hasil dari program dan kegiatan yang dilakukan baik dari sisi kualitas maupun transparansi anggaran kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk itu, BPS perlu menyusun indikator kinerja terukur yang berorientasi pada hasil bukan lagi berorientasi pada proses seperti yang selama ini BPS lakukan.

Berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan RB mengenai akuntabilitas kinerja BPS tahun 2020, salah satu permasalahan yang dihadapi adalah belum mampunya indikator kinerja di BPS untuk menggambarkan kriteria hasil kerja yang terukur. Hal ini disebabkan indikator kinerja yang ada selama ini masih berorientasi pada proses. Indikator kinerja yang berbasis *output*/hasil ini memiliki peranan penting untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program BPS yang dilaksanakan.

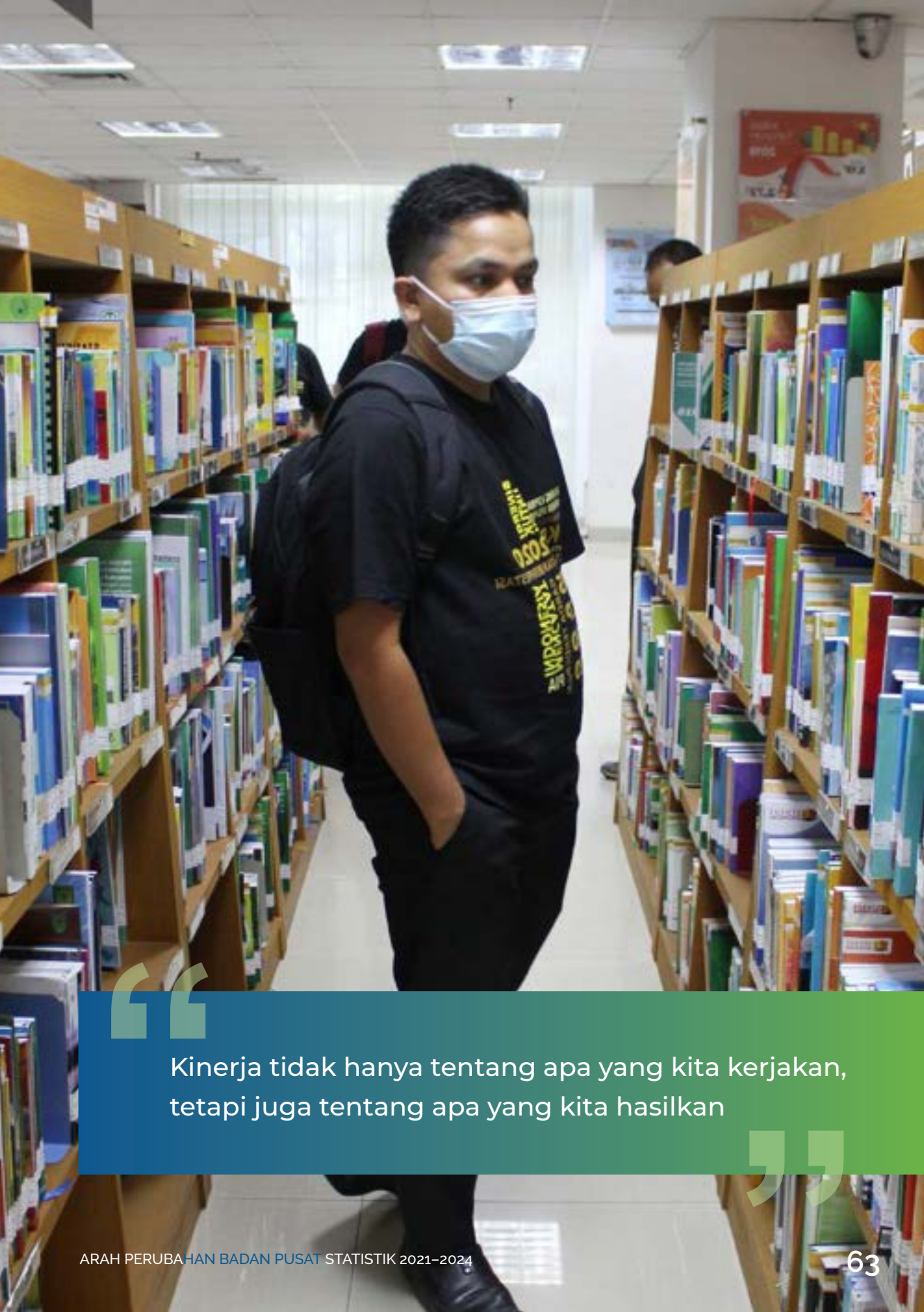
Untuk menyusun indikator kinerja yang berorientasi pada *output*/hasil, BPS dengan tim gugus tugas yang terdiri atas Biro Perencanaan, Biro SDM, Biro Hukum, Perwakilan Direktorat, dan BPS Daerah, BPS akan mulai melakukan penyusunan *output* dan *outcome* dari setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan agar indikator kinerja yang disusun komprehensif dan implementatif. Langkah-langkah yang kami lakukan adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi variabel dan indikator terbaik berjenjang berdasarkan *balance score card*
2. Membuat matriks peran dan pemangku kepentingan
3. Mengidentifikasi ketersediaan data yang dibutuhkan
4. Menguji validitas indikator yang disusun, dan
5. Meresmikan indikator kinerja sesuai ketentuan yang berlaku di BPS sebagai payung hukum

Selain itu khusus untuk menjamin kualitas dari *output* statistik yang diproduksi oleh BPS, maka BPS akan melakukan pengembangan ukuran akurasi/kualitas tidak hanya terbatas dari *Relative Standard Error* (RSE) dan *quality gates*. Untuk saat ini pengukuran akurasi masih terbatas oleh survei-survei bersampel besar yang bersifat strategis, misalnya akurasi data Susenas dan Sakernas. Kedepannya kami akan kaji beberapa survei lainnya yang dapat menyajikan level akurasi secara periodik.

Oleh karena itu, akan disusun pedoman untuk penyusunan indikator kinerja yang berbasis hasil yang dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak yang berkepentingan. Pedoman tersebut akan tertuang dalam petunjuk teknis tata cara *cascading* dan penyusunan indikator kinerja yang ditargetkan akan selesai pada akhir tahun 2021. Penyusunan Indikator Kinerja Individu yang berorientasi hasil menjadi produk *Cascading* Kinerja yang akan diimplementasikan baik pusat maupun daerah. Sebagai contoh pola *cascading* kinerja di Bidang Statistik Distribusi dan Jasa akan disusun secara rinci dari pusat sampai daerah pada tahun 2022.





“

Kinerja tidak hanya tentang apa yang kita kerjakan,  
tetapi juga tentang apa yang kita hasilkan

”

## INTERNALISASI TARGET INDIKATOR KINERJA

Beragamnya *output* yang dihasilkan pada suatu organisasi mengakibatkan pemahaman tentang target indikator menjadi beragam, target indikator pada level jabatan yang sama dapat berbeda-beda baik dari sisi jumlah indikator dan jenis indikator tergantung dari pemahaman pembuatnya. Perbedaan pemahaman tentang kinerja pada akhirnya berdampak pada pembuatan target indikator yang tidak standar.

Kondisi ideal suatu organisasi setiap level jabatan mempunyai standar target indikator, baik jumlah maupun jenis indikatornya, terdapat target indikator yang akan dicapai, terdapat SDM yang cukup tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, SDM yang tidak sesuai dengan kebutuhan harus bisa didistribusikan ke level jabatan lain sesuai dengan kebutuhan.

Target indikator menjadi salah satu penilaian keberhasilan kinerja,

dengan terciptanya target indikator yang standar diharapkan tersusun indikator kinerja setiap level jabatan. Dengan tersusunnya indikator kinerja dapat diukur prestasi kerja setiap level jabatan.

Dalam rangka pembuatan pedoman standar target indikator perlu pengkajian, pembelajaran dari ahli manajemen dan perbandingan dari Kementrian lain. Pedoman pembuatan standardisasi target indikator pedoman tersebut akan tertuang dalam petunjuk teknis tata cara *cascading* dan penyusunan indikator kinerja yang ditargetkan akan selesai pada akhir tahun 2021.

Sosialisasi dan internalisasi petunjuk teknis tata cara *cascading* dan penyusunan indikator kinerja sangat diperlukan demi tercapai tujuan organisasi.





## PENYESUAIAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU

Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses sistematis yang terdiri dari perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, tindak lanjut dan sistem informasi kinerja. Secara ringkas, manajemen kinerja terbagi dalam 4 tahapan utama.

Sayangnya, sistem manajemen kinerja di lingkungan BPS, selama ini masih berbasis aktivitas kegiatan dan merupakan penyusunan kegiatan tugas jabatan berdasarkan tugas dan fungsi. Sesuai dengan PermenPANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja, sasaran kinerja pegawai hendaknya berbasis

indikator kinerja individu dengan memperhatikan kriteria spesifik, terukur, realistis, memiliki batas waktu pencapaian, dan menyesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal organisasi.

Dengan demikian untuk mengimplementasikan sistem manajemen kinerja di atas perlu dilakukan penyesuaian kinerja mulai dari kinerja utama hingga indikator kinerja individu. Untuk mewujudkannya dimulai dengan melihat gambaran organisasi (Renstra, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja), menyusun rencana Sasaran Kinerja Pegawai/SKP dan pada akhirnya menyusun manual indikator untuk setiap individu.

### SISTEM MANAJEMEN KINERJA PNS

#### 4 Tahapan Utama



# 01

#### PERENCANAAN KINERJA

- ❑ Melakukan penyesuaian kinerja (lingkup peran dan kendali)
- ❑ Menetapkan rencana, indikator, dan target kinerja
- ❑ Menetapkan jenis dan bobot kinerja
- ❑ Menentukan cara mengukur kinerja

# 02

#### PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN KINERJA

- ❑ Mengukur Kinerja
- ❑ Memberikan *feedback*
- ❑ Melakukan tinjauan kemajuan kinerja
- ❑ Mengatasi kinerja yang buruk
- ❑ Mengapresiasi kinerja yang baik

# 03

#### PENILAIAN KINERJA

- ❑ Menilai capaian kinerja
- ❑ Melakukan pemeringkatan kinerja

# 04

#### TINDAK LANJUT

- ❑ Memberikan penghargaan terhadap kinerja baik
- ❑ Memberikan sanksi untuk kinerja buruk

### Sistem Manajemen Kinerja PNS



# KOLABORASI MENGAWAL PERUBAHAN BPS

Perubahan selalu mengandung risiko oleh karenanya akan dilakukan penyempurnaan manajemen risiko sebagai satu bagian dari manajemen pengawasan dan pemantauan kepatuhan internal. Selain itu, optimalisasi peran APIP dan penerapan SPIP menjadi kunci pencapaian kinerja yang maksimal

**Akhmad Jaelani**  
Inspektur Utama BPS RI



Penyempurnaan implementasi manajemen risiko



Optimalisasi peran APIP sebagai *quality assurance and consulting*



Peningkatan peran APIP dalam pengawasan pencapaian kinerja organisasi



Optimalisasi penerapan SPIP dan peningkatan maturitas SPIP



Inspektur Utama bersama Kepala BPS dan seluruh jajaran Deputy di Rapimkap Bali, 2021

BPS dapat mengelola risiko yang ada secara efektif dan efisien melalui peningkatan kualitas pengendalian dan pengawasan internal. Inspektorat Utama bersama dengan seluruh unit kerja di BPS akan menerapkan manajemen risiko dan melakukan pemetaan risiko secara berkelanjutan sehingga manajemen risiko bisa membudaya pada unit kerja. Lebih lanjut, paradigma pengawasan internal akan diperkuat dengan layanan konsultasi sehingga peran auditor internal pada *assurance* dan *consulting* akan lebih efektif.

Penekanan kegiatan layanan audit juga akan diperluas dengan audit kinerja. Inspektorat utama sebagai Aparat Pengawasan *Intern* Pemerintah (APIP) memberikan rekomendasi komprehensif dan mendorong peningkatan kinerja unit kerja melalui pembinaan sistem akuntabilitas kinerja. Selain itu, peningkatan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) yang sudah memadukan manajemen risiko dan pengendalian korupsi.



“ Fungsi pengawasan internal yang efektif dan efisien tidak hanya menekankan pada *assurance* tetapi juga *consulting* ”

Seluruh kegiatan ini memerlukan kolaborasi antara Inspektorat Utama sebagai APIP dan seluruh unit kerja yang ada di BPS.

Kita berlayar pada kapal yang sama, maka kolaborasi yang dilaksanakan secara terintegrasi akan menciptakan

organisasi yang kuat dan tangguh untuk sampai ke tujuan. Hal ini juga akan memperkuat akuntabilitas, baik dalam hal keuangan maupun kinerja, yang akan menjadikan BPS sebagai kantor statistik yang berkelas dunia dan dapat berlabuh di dermaga tujuan yang diinginkan.

“Perubahan di BPS perlu diiringi dengan peningkatan kualitas pengendalian dan pengawasan internal untuk memastikan pencapaian visi dan misi BPS secara efektif dan efisien.”

**Akhmad Jaelani**  
Inspektur Utama BPS RI



## MANAJEMEN RISIKO SEBUAH KEHARUSAN!

Pengelolaan manajemen risiko merupakan mandat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Setiap instansi pemerintah, termasuk BPS, wajib melakukan penilaian risiko dan menerapkan manajemen risiko.

Inspektorat Utama sebagai APIP di BPS bekerja sama dengan Unit Kerja dalam menerapkan manajemen risiko dan melakukan pemetaan risiko secara berkelanjutan dan membudaya pada seluruh unit kerja. Langkah awal adalah menyusun pedoman manajemen risiko yang diikuti dengan sosialisasi dan penyusunan aplikasi sehingga memudahkan pelaksanaan manajemen risiko.

Selain itu, akan dibentuk Tim Kepatuhan Internal di tingkat BPS Provinsi. Pembentukan seluruh kelengkapan penerapan manajemen risiko akan dievaluasi secara berkelanjutan. Kita menargetkan untuk mencapai implementasi penerapan manajemen risiko dengan melibatkan seluruh komponen di BPS.

**“BPS  
menargetkan  
75% satuan kerja  
telah mengimple-  
mentasikan  
manajemen risiko  
pada tahun 2024”**



*“Only those who will risk going too far can possibly  
find out how far one can go.”*

—T.S. Eliot.

## MENCETAK TRUSTED ADVISOR BAGI BPS

Pergeseran paradigma auditor harus dilakukan dari *watch dog* menjadi konsultan profesional yang mampu memberikan penjaminan kualitas untuk perbaikan manajemen risiko, tata kelola, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan. Tuntutan pada APIP adalah untuk menjadi *trusted advisor* bagi instansi pemerintah. Inspektorat Utama sebagai APIP di BPS harus senantiasa berbenah diri dan bertekad meningkatkan kapabilitas APIP hingga level 3,5 atau lebih di akhir 2024.

Optimalisasi peran APIP dilakukan dengan membentuk Auditor Mitra Satuan Kerja (AMS) sebagai perpanjangan tangan Inspektorat Utama.

Aplikasi konsultasi secara *online* yaitu HALO Inspektorat juga dapat dimanfaatkan sebagai media komunikasi antara unit kerja dan APIP

dalam menghadapi kendala pada Unit Kerja. Upaya lain yang dilakukan adalah penyempurnaan proses bisnis aplikasi *current* audit termasuk pengawalan proses pengadaan barang dan jasa.

Pada tahun 2021, peningkatan kapabilitas APIP dilakukan dengan mengefektifkan peran AMS dan peningkatan layanan konsultasi melalui implementasi aplikasi HALO Inspektorat (konsultasi *online*). Selain itu peningkatan pengawalan proses pengadaan barang dan jasa (PBJ), antara lain dilakukan melalui perbaikan aplikasi *current* audit dan petunjuk teknis permintaan layanan *reviu* atau *proby* audit secara cepat, transparan, dan berkualitas (CETAR). Pada tahun-tahun berikutnya layanan konsultasi dan pengawalan PBJ terus ditingkatkan, baik dari sisi proses bisnis maupun kompetensi auditornya. Oleh karena itu, secara berkala akan dilaksanakan peningkatan kompetensi APIP melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis auditor substantif dan diklat sertifikasi.

BPS berusaha meningkatkan capaian kapabilitas APIP menuju level 3,5 atau lebih di akhir 2024



Interface website HALO Inspektorat



## INSPEKTORAT UTAMA MENDORONG KINERJA

Inspektorat Utama menetapkan visi yang sejalan dengan visi BPS “Penyedia Data Berkualitas untuk Indonesia Maju” yaitu “Mitra kerja tepercaya dalam penyediaan data statistik berkualitas.” Oleh karena itu, Inspektorat Utama ke depan akan melakukan audit kinerja guna mendorong pencapaian kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja.

Audit kinerja dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi atas proses bisnis dan arah perbaikan kebijakan strategis di BPS. Di samping audit kinerja, akan dilaksanakan pendampingan atau *probing* audit pada kegiatan strategis BPS. Lebih lanjut, BPS akan mendorong pembinaan terhadap penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan evaluasi SAKIP. Hal ini diharapkan dapat mendukung peningkatan skor nilai akuntabilitas kinerja yang bermuara pada peningkatan capaian reformasi birokrasi.



**Audit kegiatan strategis BPS**

“BPS menyadari bahwa pelaksanaan pengawasan tidak cukup hanya berupa **audit keuangan**, maka kita memperluas **jangkauan pengawasan dengan audit kinerja** terhadap tugas dan fungsi yang fokus pada perbaikan proses bisnis dan arah kebijakan strategis.”



**Audit pengadaan barang dan jasa**

## SIKLUS PENINGKATAN MATURITAS SPIP

Pencapaian tujuan organisasi yang efektif, efisien, taat aturan, dan pelaporan keuangan yang andal tergambar dari maturitas SPIP. BPS perlu memelihara dan meningkatkan sistem pengendalian intern agar dapat mempertahankan keandalan laporan keuangan serta opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Maturitas SPIP juga sebagai indikator peningkatan indeks manajemen risiko dan efektivitas pencegahan korupsi. Oleh karena itu, penilaian maturitas SPIP dapat menunjukkan pencapaian indikator tersebut termasuk identifikasi *Area of Improvement* (AOI).

Optimalisasi peningkatan capaian maturitas SPIP dapat dihasilkan melalui perbaikan pada AOI secara terus menerus. BPS telah melakukan *workshop* terkait penilaian maturitas SPIP dan seluruh satker akan melakukan penilaian mandiri serta penjaminan kualitas pada tahun 2021. Proses penilaian mandiri ini menghasilkan AOI dan akan dilaksanakan tindak lanjut secara terukur yang dimulai pada tahun 2021. Penilaian maturitas yang dilakukan secara siklus dimulai dari identifikasi AOI, perbaikan AOI, serta melakukan penilaian kembali. Melalui siklus penilaian ini, BPS akan mampu menghasilkan maturitas SPIP pada level 3,75 pada akhir tahun 2024.



### JANGKA PENDEK

BPS menargetkan kenaikan level maturitas SPIP 3,5 dalam jangka pendek yaitu akhir 2021



### JANGKA PANJANG

BPS menargetkan kenaikan level maturitas SPIP 3,75 dalam jangka panjang yaitu akhir 2024



**BPS kembali raih opini WTP  
hasil pemeriksaan BPK RI**

# RENCANA AKSI BPS 2021-2024

## RENCANA AKSI STRATEGI NASIONAL PEMBANGUNAN STATISTIK INDONESIA

Deskripsi Isu	Rencana Aksi	Output Yang Diharapkan	Periode Penyelesaian	Ukuran Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PENYUSUNAN SNPSI YANG DITUANGKAN DALAM REGULASI				
Belum tersedianya dokumen yang memuat strategi nasional pembangunan statistik untuk mewujudkan kegiatan statistik yang terintegrasi antar K/L/D/I menuju Sistem Statistik Nasional yang andal	1. Identifikasi cakupan strategi dalam SNPSI	Teridentifikasi dan ditetapkan strateginya yang akan dicakup dalam SNPSI	2021	Tersusunnya dokumen SNPSI yang dituangkan dalam regulasi
	2. Pemetaan pemangku kepentingan SNPSI	Tersedianya pemetaan pemangku kepentingan SNPSI	2021	
	3. Penyusunan SNPSI yang dituangkan dalam regulasi	Tersusunnya dokumen SNPSI yang dituangkan dalam regulasi	2021	
PENYIAPAN INFRASTRUKTUR UNTUK PENERAPAN SNPSI				
Belum tersedia infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan pembangunan statistik Indonesia	1. Menyusun daftar kebutuhan infrastruktur SNPSI	Tersusunnya daftar kebutuhan instruktur SNPSI	2022	Tersedianya infrastruktur SNPSI
	2. Melakukan perancangan dan pembangunan infrastruktur SNPSI (termasuk platform yang akan digunakan) sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi	Tersedianya infrastruktur yang dibutuhkan untuk penerapan SNPSI	2022	



Deskripsi Isu	Rencana Aksi	Output Yang Diharapkan	Periode Penyelesaian	Ukuran Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>PENINGKATAN LITERASI SNPSI KEPADA PARA PEMANGKU KEPENTINGAN</b>				
<b>Belum samanya persepsi <i>stakeholders</i> (K/L/D/I, sektor swasta, dan masyarakat) mengenai SNPSI</b>	Melakukan internalisasi maupun sosialisasi terkait SNPSI secara berkala kepada <i>stakeholders</i>	Meningkatnya pemahaman/literasi <i>stakeholders</i> mengenai SNPSI	2021-2024	1. Meningkatnya pemahaman/literasi <i>stakeholders</i> mengenai SNPSI 2. Meningkatnya peran serta aktif para <i>stakeholder</i> dalam penerapan SNPSI
<b>KOORDINASI DAN KOLABORASI ANTAR K/L/D/I SERTA PENETAPAN STANDAR DATA STATISTIK MENUJU IMPLEMENTASI SNPSI</b>				
<b>Tiap K/L/D/I memiliki mandat masing-masing untuk menyelenggarakan kegiatan statistik yang berdampak pada duplikasi kegiatan statistik dan disintegrasi data antar K/L/D/I</b>	1. Memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi antar K/L/D/I dalam kerangka SSN	Terwujudnya koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi yang baik antar K/L/D/I dalam menyelenggarakan kegiatan statistik	2021-2023	Terwujudnya implementasi SNPSI, terutama dalam hal berbagi-pakai data antar K/L/D/I dengan menggunakan infrastruktur (termasuk platform) yang telah dibangun
	2. Menetapkan Standar Data Statistik yang akan digunakan	Terstandarnya data statistik dan metadata yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik oleh K/L/D/I	2021-2023	

# RENCANA AKSI TRANSFORMASI PROSES BISNIS STATISTIK

Deskripsi Isu	Rencana Aksi	Output Yang Diharapkan	Periode Penyelesaian	Ukuran Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PEMETAAN RELEVANSI SURVEI				
<p>Belum tersedianya kajian yang mengevaluasi relevansi survei-survei yang diselenggarakan BPS antara lain dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Indikator yang dikumpulkan</li><li>Dukungan terhadap Neraca/SDGs/ Prioritas Nasional</li><li>Kesesuaian metode pengumpulan data</li><li>Ketersediaan data administratif</li><li>Pemetaan aliran data dari <i>subject matter</i> ke Neraca</li><li>Kebutuhan data Neraca yang belum tersedia di <i>subject matter</i> (jasa perusahaan, jasa lainnya)</li><li>Tumpang tindih variabel yang dikumpulkan antar survei</li></ul>	1a. Melakukan pemetaan metadata variabel survei berbasis usaha			
	Memetakan variabel yang dikumpulkan pada survei berbasis usaha	Tersedianya daftar variabel pada survei berbasis usaha yang tumpang tindih dengan survei lainnya (mencakup nama survei dan daftar variabel)	Des 2021	Tersedianya metadata variabel survei berbasis usaha sebagai dasar evaluasi variabel yang tumpang tindih antar survei
	Menyusun daftar variabel pada survei berbasis usaha yang tumpang tindih dengan survei lainnya			
	1b. Melakukan pemetaan metadata kegiatan statistik			
	Mengumpulkan informasi mengenai nama survei dan karakteristiknya dari <i>subject matter</i> dan Neraca	<ol style="list-style-type: none"><li>Tersedianya instrumen IPS yang telah diujicobakan</li><li>Tersedianya <i>draft</i> Peraturan BPS tentang IPS</li></ol>	2021	<ol style="list-style-type: none"><li>Tersedianya Instrumen IPS</li><li>Tersedianya laporan sosialisasi IPS di internal maupun eksternal BPS</li><li>Tersedianya laporan ujicoba instrumen IPS</li><li>Tersedianya draft Peraturan BPS tentang IPS</li></ol>
	Menyusun analisis relevansi kegiatan statistik yang mencakup: Indikator yang dikumpulkan; Dukungan terhadap Neraca/SDGs/Prioritas Nasional; Kesesuaian metode pengumpulan data; Ketersediaan data administratif; Pemetaan aliran data dari <i>subject matter</i> ke Neraca; Kebutuhan data Neraca yang belum tersedia di <i>subject matter</i> (jasa perusahaan, jasa lainnya)			

Deskripsi Isu	Rencana Aksi	Output Yang Diharapkan	Periode Penyelesaian	Ukuran Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1c. Melakukan pemetaan metadata variabel survei berbasis rumah tangga			
	Memetakan variabel yang dikumpulkan pada survei berbasis rumah tangga	Tersedianya daftar variabel pada survei berbasis usaha yang tumpang tindih dengan survei lainnya (mencakup nama survei dan daftar variabel)	Jan-Jun 2022	Tersedianya metadata variabel survei berbasis rumah tangga sebagai dasar evaluasi variabel yang tumpang tindih antar survei
	Menyusun daftar variabel pada survei berbasis rumah tangga yang tumpang tindih dengan survei lainnya			
	1d. Menyusun kriteria standar untuk menentukan skala prioritas tiap survei berdasarkan hasil pemetaan metadata variabel maupun metadata kegiatan statistik yang telah dilakukan			
	Menetapkan kriteria standar yang digunakan sebagai dasar penentuan skala prioritas survei	Tersedianya kriteria standar untuk menentukan skala prioritas tiap survei (usaha dan rumah tangga)	Jan-Jun 2022	Tersusunnya kegiatan statistik BPS berdasarkan skala prioritasnya
	Menyusun skala prioritas masing-masing survei berdasarkan kriteria standar yang telah ditetapkan			



Deskripsi Isu	Rencana Aksi	Output Yang Diharapkan	Periode Penyelesaian	Ukuran Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>INTEGRASI STATISTIK</b>				
<p>Proses bisnis statistik yang diadopsi masih menggunakan pendekatan <i>traditional approach</i>, dimana proses penyelenggaraan survei masih dilakukan oleh masing-masing <i>subject matter</i> (silo).</p> <p>Hal tersebut berdampak pada tumpang tindihnya sampel, variabel yang dikumpulkan, pengambilan sampel, maupun pada jadwal pelaksanaan lapangan.</p> <p>Kondisi tersebut mengakibatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• proses bisnis statistik dalam penyelenggaraan survei tidak efektif</li> <li>• banyaknya variabel yang dikumpulkan, namun kebutuhan data Neraca untuk penyusunan PDB/PDRB belum sepenuhnya dapat dipasok oleh <i>subject matter</i></li> </ul>	2a. Menyamakan persepsi dan pemahaman terkait integrasi statistik dan transformasi proses bisnis statistik untuk mewujudkan Neraca Nasional dan statistik makro sebagai penerima manfaat utama dari proses bisnis statistik yang terintegrasi			
	Melakukan internalisasi untuk mendukung terselenggaranya integrasi proses bisnis statistik dan implikasinya terhadap organisasi	Meningkatnya pemahaman pegawai mengenai pentingnya integrasi proses bisnis statistik, tahapan pelaksanaan, dan implikasinya	2019-2022	Peningkatan expertise pegawai dalam melakukan integrasi survei dan berkurangnya resistensi untuk melakukan transformasi proses bisnis ( <i>culture change</i> )
	Melakukan <i>capacity building/ knowledge sharing System of National Accounts</i> (SNA) dan/atau manual standar lainnya terkait Neraca Nasional dan statistik makro.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya pemahaman pegawai tentang hubungan data hasil survei dengan kebutuhan Neraca Nasional dan statistik makro</li> <li>• SM mampu mengidentifikasi kebutuhan variabel-variabel dan melakukan perbaikan proses bisnis sesuai dengan kebutuhan integrasi</li> </ul>	2019-2022	

Deskripsi Isu	Rencana Aksi	Output Yang Diharapkan	Periode Penyelesaian	Ukuran Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• relatif tingginya beban responden, terutama pada survei berbasis usaha</li> <li>• relatif tingginya beban petugas akibat banyaknya jumlah survei yang ada dengan jadwal yang tumpah tindih</li> </ul>	2b. Menyiapkan tata kelola pelaksanaan integrasi statistik			
	Menyusun tata kelola (aturan, proses, pengelolaan, jadwal, target output, monitoring dan evaluasi) pelaksanaan integrasi statistik	Tersedianya tata kelola pelaksanaan integrasi statistik dan disepakati oleh pihak terkait (Bisnis dan Rumah tangga)	2021	Terlaksananya integrasi statistik ekonomi, sosial, dan lingkungan yang sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi dan disepakati oleh berbagai pihak sesuai dengan tata kelola (jadwal kegiatan, SK tim kerja, dan target output) yang telah disusun
	Membentuk <i>Steering Committee</i> lintas unit kerja yang dipimpin oleh Eselon 1 yang bertugas memberikan input kepada Kepala BPS dalam memutuskan survei apa saja yang akan diintegrasikan.	Terbentuknya <i>Steering Committee</i> dalam bentuk SK/Perka	2022	Terlaksananya integrasi survei berdasarkan input/penentuan dari <i>Steering Committee</i>

Deskripsi Isu	Rencana Aksi	Output Yang Diharapkan	Periode Penyelesaian	Ukuran Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2c. Melakukan pengembangan <i>Statistical Business Register</i> (SBR) sebagai kerangka sampel terintegrasi untuk seluruh survei berbasis usaha			
	Memastikan sistem SBR sudah dapat diakses oleh SM dan bisa mendukung proses integrasi	Tersedianya SBR sebagai kerangka sampel survei berbasis usaha yang mutakhir dan terintegrasi untuk digunakan sebagai kerangka sampel seluruh survei berbasis usaha	2019-2024 SBR dimutakhirkan secara bertahap dan berkelanjutan disesuaikan dengan kategori usaha yang akan digunakan agar nantinya terbentuk direktori usaha yang lengkap & mutakhir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya SBR yang dimutakhirkan secara berkala dan komprehensif untuk digunakan sebagai kerangka sampel terintegrasi untuk seluruh survei berbasis usaha</li> <li>Pengambilan sampel dilakukan secara efektif, komprehensif, dan terintegrasi berdasarkan seluruh kategori lapangan usaha</li> </ul>
	Mengumpulkan direktori usaha baik dari subject matter/hasil survei maupun dari instansi lain			
	Melakukan <i>matching</i> usaha/perusahaan yang akan dimasukkan ke dalam SBR untuk memastikan belum adanya usaha/perusahaan tersebut di dalam SBR (tidak ganda)			
	2d. Melakukan integrasi survei berbasis usaha dalam bentuk piloting <i>Economy-wide Survey</i> (EWS)			
	SPECIFY NEEDS			
	Melakukan FGD dengan kementerian/dinas terkait	Terlaksananya FGD dengan kementerian/dinas terkait untuk mendapatkan masukan antara lain mengenai kebutuhan data kementerian/dinas, ketersediaan data di instansi lain, ataupun mengenai klasifikasi/konsep-definisi variabel yang biasanya digunakan	2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya tata kelola proses bisnis statistik yang lebih terintegrasi pada fase <i>Specify Needs</i> yang disahkan dan dilaksanakan</li> </ul>



Deskripsi Isu	Rencana Aksi	Output Yang Diharapkan	Periode Penyelesaian	Ukuran Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Melakukan FGD dengan responden untuk menyampaikan maksud, tujuan, serta harapan kontribusi dari responden	Terlaksananya FGD dengan responden untuk menyampaikan maksud, tujuan, serta harapan kontribusi dari responden		<ul style="list-style-type: none"> <li>Variabel yang dikumpulkan pada kegiatan statistik sesuai dengan kebutuhan pengguna internal maupun eksternal</li> </ul>
	<i>DESIGN</i>			
	Merancang sistem Informasi Teknologi (TI) untuk mendukung: <i>Data Collection</i> , <i>Dashboard</i> , Tabel Pokok; SBR; ICS	Tersedianya rancangan sistem Informasi Teknologi (IT) untuk mendukung integrasi statistik khususnya integrasi survei berbasis usaha dan survei berbasis rumah tangga	2020	Proses bisnis statistik untuk fase <i>Design</i> , dan <i>Build</i> lebih terintegrasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem TI lebih terintegrasi dalam mendukung setiap fase proses bisnis EWS agar semakin efektif</li> </ul>
	Menyusun <i>Quality Assurance Framework</i> (QAF) untuk integrasi survei berbasis usaha	Tersusunnya rancangan <i>Quality Assurance Framework</i> (QAF) untuk integrasi survei berbasis usaha		<ul style="list-style-type: none"> <li>Data hasil survei lebih berkualitas yang didukung oleh diimplementasikannya aturan standar data dan metadata serta <i>Quality Assurance Framework</i> (QAF)</li> </ul>
	Melakukan <i>reengineering</i> proses bisnis statistik dan SOP untuk survei berbasis usaha	Terlaksananya <i>reengineering</i> proses bisnis statistik dan tersedianya SOP survei berbasis usaha		

Deskripsi Isu	Rencana Aksi	Output Yang Diharapkan	Periode Penyelesaian	Ukuran Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Menyediakan kerangka sampel usaha yang mutakhir dan terintegrasi di dalam <i>Statistical Business Register</i> (SBR) untuk digunakan sebagai kerangka sampel seluruh survei berbasis usaha	Tersedianya kerangka sampel survei berbasis usaha yang mutakhir dan terintegrasi di dalam SBR untuk industri manufaktur (Kategori C) yang akan digunakan sebagai cakupan ujicoba EWS		
	Menyediakan direktori usaha untuk dipilih sebagai sampel pilot kegiatan EWS untuk industri manufaktur	Tersedianya direktori usaha untuk dipilih sebagai sampel ujicoba kegiatan EWS untuk industri manufaktur		
	Merancang kuesioner EWS triwulanan dan tahunan yang terpetakan ke <i>Framework SNA</i>	Tersedianya kuesioner EWS untuk triwulanan dan tahunan yang terpetakan ke <i>Framework SNA</i>		
	Merancang metodologi untuk perluasan integrasi survei berbasis usaha (EWS)	Tersedianya metodologi untuk memperluas cakupan integrasi survei berbasis usaha	2022	
	<i>BUILD</i>			
	Melakukan uji kognitif terhadap kuesioner EWS (3.2)	Tersedianya kuesioner EWS yang telah melalui uji kognitif	2020	Proses bisnis statistik untuk fase <i>Design</i> , dan <i>Build</i> lebih terintegrasi:

Deskripsi Isu	Rencana Aksi	Output Yang Diharapkan	Periode Penyelesaian	Ukuran Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Mentransfer draft kuesioner EWS ke dalam <i>Integrated Collection System</i> (ICS) (3.1)	Tersedianya draft kuesioner EWS dalam <i>Integrated Collection System</i> (ICS)	2021	<ul style="list-style-type: none"><li>• Keberpihakan kepada responden dengan adanya mekanisme uji kognitif untuk mengurangi beban responden</li><li>• Data hasil survei lebih berkualitas yang didukung oleh diimplementasikannya aturan standar data dan metadata serta <i>Quality Assurance Framework</i> (QAF)</li></ul>
	Mentransfer draft kuesioner EWS ke dalam <i>Integrated Collection System</i> (ICS) (3.1)	Tersedianya draft kuesioner EWS dalam <i>Integrated Collection System</i> (ICS)		
	Menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan EWS (3.3)	Tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan EWS		
	COLLECT			
	Melakukan pilot EWS yang ditandai dengan <i>Kick-off</i> kegiatan piloting pengumpulan data EWS di Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat	Terlaksananya pilot EWS di Provins DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat	2021	Terlaksananya pilot EWS sesuai dengan tata kelola (jadwal kegiatan dan target output) yang telah ditetapkan
	Melakukan pengujian kerangka penjaminan kualitas terhadap survei berbasis usaha	Terlaksananya pengujian terhadap kerangka penjaminan kualitas untuk survei berbasis usaha		Terlaksananya penjaminan kualitas terhadap tahapan proses bisnis EWS
	PROCESS			
	Melakukan proses pengolahan data hasil EWS	Terlaksananya proses pengolahan data hasil EWS	2021	Terlaksananya proses pengolahan data hasil EWS



Deskripsi Isu	Rencana Aksi	Output Yang Diharapkan	Periode Penyelesaian	Ukuran Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Menyiapkan dan melakukan proses <i>clearance</i> /transmisi data hasil survei EWS ke Neraca Nasional	Tersedia dan terlaksananya proses <i>clearance</i> /transmisi data dari hasil survei ke Neraca Nasional	2021	Terlaksananya proses <i>clearance</i> / transmisi data dari hasil survei ke Neraca Nasional sesuai panduan yang telah disiapkan
	Melakukan [experimental] persiapan penyusunan Indeks Produksi Manufaktur berdasarkan hasil integrasi survei berbasis usaha agar konsisten dengan data Neraca dan statistik makro	Terlaksananya kegiatan persiapan penyusunan Indeks Produksi Manufaktur berdasarkan hasil integrasi survei berbasis usaha yang konsisten dengan data Neraca dan statistik makro	2022	Terlaksananya kegiatan persiapan penyusunan Indeks Produksi Manufaktur berdasarkan hasil integrasi survei berbasis usaha yang konsisten dengan data Neraca dan statistik makro
	ANALYSE & DISSEMINATE (UJI COBA)			
	Melakukan [experimental] penyusunan Indeks Produksi Manufaktur berdasarkan hasil integrasi survei berbasis usaha agar konsisten dengan data Neraca dan statistik makro	Terlaksananya penyusunan [experimental] Indeks Produksi Manufaktur berdasarkan hasil integrasi survei berbasis usaha yang konsisten dengan data Neraca dan statistik makro	2023	Tersusunnya Indeks Produksi Manufaktur berdasarkan hasil integrasi survei berbasis usaha yang konsisten dengan data Neraca dan statistik makro
	Melakukan [experimental] persiapan proses <i>clearance</i> /transmisi data hasil integrasi survei berbasis usaha ke Neraca Nasional untuk mendukung persiapan <i>rebasing</i> /perubahan tahun dasar PDB/PDRB	Terlaksananya kegiatan persiapan proses <i>clearance</i> / transmisi data hasil integrasi survei berbasis usaha ke Neraca Nasional yang mendukung persiapan <i>rebasing</i> / perubahan tahun dasar PDB/PDRB		Terlaksananya kegiatan persiapan proses <i>clearance</i> / transmisi data hasil integrasi survei berbasis usaha ke Neraca Nasional yang mendukung persiapan <i>rebasing</i> / perubahan tahun dasar PDB/PDRB

Deskripsi Isu	Rencana Aksi	Output Yang Diharapkan	Periode Penyelesaian	Ukuran Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Menggunakan hasil integrasi survei berbasis usaha sebagai input untuk perluasan cakupan penyusunan Indeks Produksi Manufaktur	Digunakannya hasil integrasi survei berbasis usaha sebagai input untuk perluasan akupan penyusunan Indeks Produksi Manufaktur	2024	Dapat digunakannya hasil integrasi survei berbasis usaha sebagai input untuk perluasan akupan penyusunan Indeks Produksi Manufaktur
	Menggunakan hasil integrasi pada survei berbasis usaha sebagai input penyusunan/penghitungan perubahan tahun dasar PDB/PDRB	Digunakannya hasil integrasi survei berbasis usaha sebagai input penyusunan/penghitungan perubahan tahun dasar PDB/PDRB	2024	Dapat digunakannya hasil integrasi survei berbasis usaha sebagai input penyusunan/penghitungan perubahan tahun dasar PDB/PDRB
	EVALUATE			
	Melakukan monitoring dan evaluasi tiap tahapan kegiatan EWS	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan EWS	2019-2024	Terlaksananya proses monitoring dan evaluasi di tiap tahapan EWS yang dapat dijadikan masukan/input terhadap perbaikan integrasi survei berbasis usaha di periode mendatang
	2e. Melakukan integrasi Business Characteristics Survey (BCS) dan Economy-wide Survey (EWS)			
	Menyempurnakan tata kelola atau proses bisnis BCS dan EWS	Tersusunnya tata kelola atau proses bisnis BCS dan EWS	2022	Tersusunnya Tata kelola atau proses bisnis BCS dan EWS
	Melakukan identifikasi kebutuhan data karakteristik perusahaan	Tersusunnya identifikasi kebutuhan data karakteristik perusahaan	2022	Tersusunnya identifikasi kebutuhan data karakteristik perusahaan

Deskripsi Isu	Rencana Aksi	Output Yang Diharapkan	Periode Penyelesaian	Ukuran Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Menyusun mekanisme <i>updating</i> SBR dari BCS	Tersusunnya mekanisme <i>updating</i> SBR dari BCS	2022	Tersusunnya mekanisme <i>updating</i> SBR dari BCS
	Melakukan integrasi pengambilan sampel	Terintegrasinya pengambilan sampel BCS dan EWS	2022	Terintegrasinya pengambilan sampel BCS dan EWS
	Melakukan <i>updating</i> kuesioner BCS sesuai kebutuhan	Tersusunnya kuesioner BCS yang sudah diupdate sesuai kebutuhan	2022	Tersusunnya kuesioner BCS yang sudah diupdate sesuai kebutuhan
	Melakukan integrasi organisasi pelaksanaan lapangan	Terintegrasinya organisasi pelaksanaan lapangan BCS dan EWS	2023	Terintegrasinya organisasi pelaksanaan lapangan BCS dan EWS
	Melakukan penjaminan kualitas terhadap kegiatan integrasi yang dilakukan	Terlaksananya penjaminan kualitas terhadap kegiatan integrasi yang dilakukan	2023	Terlaksananya penjaminan kualitas terhadap kegiatan integrasi yang dilakukan
	2f. Merancang persiapan integrasi survei berbasis rumah tangga			
	SPECIFY NEEDS			
	Melakukan <i>gap analysis</i> survei berbasis rumah tangga dengan kebutuhan penggunaanya	Disusunnya <i>gap analysis</i> antara survei berbasis rumah tangga dengan kebutuhan penggunaanya	2022	Tersedianya <i>gap analysis</i> sebagai dasar identifikasi kebutuhan pengguna data
	DESIGN			
	Menyediakan kerangka sampel rumah tangga yang mutakhir dan terintegrasi ( <i>Household Frame</i> ) untuk digunakan sebagai kerangka sampel seluruh survei berbasis rumah tangga	Tersedianya kerangka sampel rumah tangga yang mutakhir dan terintegrasi ( <i>Household Frame</i> ) untuk digunakan sebagai kerangka sampel seluruh survei berbasis rumah tangga	2023	Tersedia dan digunakan kerangka sampel rumah tangga yang mutakhir dan terintegrasi ( <i>Household Frame</i> ) sebagai kerangka sampel seluruh survei berbasis rumah tangga



Deskripsi Isu	Rencana Aksi	Output Yang Diharapkan	Periode Penyelesaian	Ukuran Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<i>BUILD</i>			
	Melakukan persiapan proses integrasi survei berbasis rumah tangga	Terlaksananya kegiatan persiapan proses integrasi survei berbasis rumah tangga	2023	Terlaksananya kegiatan persiapan proses integrasi survei berbasis rumah tangga
	<i>COLLECT</i>			
	Melakukan ujicoba integrasi survei berbasis rumah tangga	Dilakukannya ujicoba integrasi survei berbasis rumah tangga	2024	Terlaksananya uji-coba integrasi survei berbasis rumah tangga
	<i>PROCESS</i>			
	Mengolah data hasil ujicoba integrasi survei berbasis rumah tangga	Terlaksananya kegiatan pengolahan data hasil ujicoba integrasi survei berbasis rumah tangga	2024	Proses pengolahan data hasil ujicoba integrasi survei berbasis usaha sesuai dengan yang ditargetkan
	<i>ANALYSE &amp; DISSEMINATE (UJI COBA)</i>			
	Melakukan [experimental] persiapan proses clearance/transmisi data hasil integrasi survei berbasis rumah tangga ke Neraca Nasional untuk mendukung persiapan <i>rebasing</i> /perubahan tahun dasar PDB/PDRB	Terlaksananya kegiatan persiapan proses <i>clearance</i> /transmisi data hasil integrasi survei berbasis rumah tangga ke Neraca Nasional yang mendukung persiapan <i>rebasing</i> /perubahan tahun dasar PDB/PDRB	2024	Terlaksananya kegiatan persiapan proses <i>clearance</i> /transmisi data hasil integrasi survei berbasis rumah tangga ke Neraca Nasional yang mendukung persiapan <i>rebasing</i> /perubahan tahun dasar PDB/PDRB
	Menggunakan hasil integrasi pada survei berbasis rumah tangga sebagai input penyusunan/penghitungan perubahan tahun dasar PDB/PDRB	Digunakannya hasil integrasi survei berbasis rumah tangga sebagai input penyusunan/penghitungan perubahan tahun dasar PDB/PDRB	2024	Dapat digunakannya hasil integrasi survei berbasis rumah tangga sebagai input penyusunan/penghitungan perubahan tahun dasar PDB/PDRB

Deskripsi Isu	Rencana Aksi	Output Yang Diharapkan	Periode Penyelesaian	Ukuran Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>EVALUATE</b>			
	Melakukan monitoring dan evaluasi tiap tahapan kegiatan ujicoba integrasi survei berbasis rumah tangga	Terlaksananya monitoring dan evaluasi tiap tahapan kegiatan ujicoba integrasi survei berbasis rumah tangga	2021-2024	Terlaksananya proses monitoring dan evaluasi di tiap tahapan integrasi survei berbasis rumah tangga yang dapat dijadikan masukan/ input terhadap perbaikan integrasi survei berbasis usaha di periode mendatang
<b>PEMANFAATAN BIG DATA UNTUK OFFICIAL STATISTICS</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih banyak kendala dalam pemanfaatan <i>big data</i> untuk <i>official statistics</i>, di antaranya masalah kualitas, legalitas, klasifikasi yang digunakan, aksesibilitas, akuisisi data, dan kompleksitas <i>big data</i> yang tersedia</li> <li>Belum adanya panduan resmi dari UN terkait pemanfaatan <i>big data</i> untuk <i>official statistics</i></li> </ul>	3a. Membangun prinsip-prinsip dasar dan proses bisnis yang standar dalam pemanfaatan <i>big data</i> untuk <i>official statistics</i>			
	Melanjutkan kajian kelayakan penggunaan <i>big data</i> untuk <i>official statistics</i> yang telah dilakukan sebelumnya (2015-2020) serta membuktikan konsep-konsep yang mungkin bisa diterapkan pada <i>big data</i> berdasarkan kajian-kajian tersebut	Tersediannya dokumen kajian kelayakan sumber-sumber <i>big data</i> yang dapat dimanfaatkan untuk <i>official statistics</i>	Jan-Nov 2021	Tersediannya dokumen tata kelola pemanfaatan <i>big data</i> untuk <i>official statistics</i> pada 2023
	Melakukan eksplorasi sumber <i>big data</i> berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan data oleh BPS dalam rangka mempelajari prinsip-prinsip yang berlaku secara umum dalam pemanfaatan <i>big data</i>	Tersediannya dokumen/laporan terkait prinsip-prinsip dasar yang standar dalam pemanfaatan <i>big data</i> untuk <i>official statistics</i>	Jul-Des 2021	

Deskripsi Isu	Rencana Aksi	Output Yang Diharapkan	Periode Penyelesaian	Ukuran Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Memahami dan mempelajari proses bisnis statistik yang terjadi dalam pemanfaatan <i>big data</i> dan mendetailkan ke dalam subproses sesuai sumber <i>big data</i> -nya	Tersedianya dokumen/laporan terkait proses bisnis statistik dalam pemanfaatan <i>big data official statistics</i>	Jul 2021-Mar 2022	
	Mempelajari best practice pemanfaatan <i>big data</i> untuk <i>official statistics</i> yang mungkin sudah dilakukan NSO lain terkait berbagai prinsip dan proses bisnis yang terjadi dalam pemanfaatan <i>big data</i>	Laporan hasil kajian berdasarkan best practice NSO lain dan literatur terkait isu prinsip dan proses bisnis dalam pemanfaatan <i>big data</i>	Jan 2021-Mar 2022	
	3b. Membangun metodologi standar dalam pemanfaatan <i>big data</i> untuk <i>official statistics</i>			
	Melakukan kajian untuk mempelajari metodologi yang sesuai bagi pemanfaatan <i>big data</i> untuk <i>official statistics</i> , dengan mengambil beberapa contoh kasus seperti IHK, angka kemiskinan, TPT, PDB dll	Tersedianya hasil kajian metodologi pemanfaatan <i>big data</i> untuk (i) penghitungan IHK pada Desember 2021; (ii) penghitungan kemiskinan pada Maret 2022;	Jul 2020-Des 2022	



Deskripsi Isu	Rencana Aksi	Output Yang Diharapkan	Periode Penyelesaian	Ukuran Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Mempelajari <i>best practice</i> terkait metodologi pemanfaatan <i>big data</i> untuk <i>official statistics</i> yang mungkin sudah dilakukan NSO / lembaga internasional lainnya	(iii) <i>supporting statistics</i> bagi PDB dan <i>official statistics</i> lainnya pada Juni 2022		
	Menyusun metodologi yang sesuai menurut jenis dan sumber <i>big data</i> yang digunakan agar dapat dimanfaatkan untuk <i>official statistics</i> atau sebagai data pendukung untuk <i>official statistics</i> beserta perumusan metadatanya (meta data input/ <i>big data</i> dan meta data statistik yang dihasilkan dari <i>big data</i> )	Tersusunnya metodologi pemanfaatan <i>big data</i> yang standar sesuai dengan jenis/sumber <i>big data</i> untuk <i>official statistics</i> pada Desember 2022	Jan-Des 2022	
	Membangun dan mengembangkan penggunaan kecerdasan artifisial (AI) dalam rangka mendukung pemanfaatan <i>big data</i> untuk <i>official statistics</i>	Tersusunnya metodologi penerapan kecerdasan artifisial ( <i>artificial intelligence</i> ) dalam pemanfaatan <i>big data</i> untuk <i>official statistics</i> pada Des 2023	Jan 2022-Des 2023	

Deskripsi Isu	Rencana Aksi	Output Yang Diharapkan	Periode Penyelesaian	Ukuran Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	3c. Membangun infrastruktur pengelolaan dan pemanfaatan <i>big data</i> untuk <i>official statistics</i>			
	Membuat list kebutuhan infrastruktur pengelolaan dan pemanfaatan <i>big data</i>	Tersedianya daftar kebutuhan infrastruktur pengelolaan dan pemanfaatan <i>big data</i> pada Des 2021	Jul-Des 2021	
	Melakukan proses desain dan implementasi infrastruktur pengelolaan dan pemanfaatan <i>big data</i> sesuai dengan list kebutuhan yang telah dibuat	Tersedianya rancangan infrastruktur pengelolaan dan pemanfaatan <i>big data</i> pada Nov 2022	Jan-Nov 2022	
	Menyediakan infrastruktur pengelolaan <i>big data</i> (penyimpanan, pengolahan, analisis dan penyajian) yang memadai untuk pengembangan <i>big data</i>	Tersedianya infrastruktur pengelolaan dan pemanfaatan <i>big data</i> untuk <i>official statistics</i> yang memadai pada Nov 2022	Jul 2021-Nov 2022	
	3d. Membangun kerjasama dengan internal dan eksternal dalam rangka mendukung pemanfaatan <i>big data</i> untuk <i>official statistics</i>			
	Mengkaji potensi penggunaan <i>big data</i> untuk variabel-variabel yang pengumpulan datanya masih dilakukan secara primer bersama unit kerja terkait	Tersedianya hasil kajian bersama SM terkait untuk variabel-variabel yang ada di survei yang bisa digantikan dengan <i>big data</i>	Jan 2021-Jun 2022	

Deskripsi Isu	Rencana Aksi	Output Yang Diharapkan	Periode Penyelesaian	Ukuran Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Membangun kerjasama dengan penyedia <i>big data</i> eksternal (pihak swasta, komunitas, dan lainnya) untuk menjamin keberlangsungan akses data dan pengelolaan data beserta metadatanya	Adanya dukungan yang kuat dari pihak eksternal dalam mengoptimalkan pemanfaatan <i>big data</i> untuk <i>official statistics</i> dalam bentuk MoU pada Des 2022	Jul 2021- Des 2022	
	Melakukan koordinasi atau pertukaran informasi dengan K/L dan lembaga internasional, terkait dengan pemanfaatan <i>big data</i> termasuk kerjasama dalam hal <i>sharing session/TA</i> dengan lembaga internasional atau NSO lain	Tersedianya laporan terkait pengalaman KL/NSO/Lembaga internasional terkait dengan pemanfaatan <i>big data</i> dalam berbagai aspek baik teknis maupun non teknis pada Des 2022	Jan 2021- Des 2022	
	3e. Menyusun panduan penjaminan kualitas pemanfaatan <i>big data</i> untuk <i>official statistics</i>			
	Mempelajari proses yang terjadi dalam pemanfaatan <i>big data</i> di setiap tahapan mulai dari proses pengambilan data sampai dengan penyajian untuk mendapatkan insight terkait aspek-aspek kualitas data dalam pemanfaatan <i>big data</i>	Tersedianya dokumen hasil kajian tentang berbagai aspek kualitas dalam proses pemanfaatan <i>big data</i>	Jan-Jun 2022	Tersedianya dokumen/laporan pedoman kerangka penjaminan kualitas pemanfaatan <i>big data</i> untuk <i>official statistics</i> pada akhir tahun 2022



Deskripsi Isu	Rencana Aksi	Output Yang Diharapkan	Periode Penyelesaian	Ukuran Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Mempelajari best practice terkait penjaminan kualitas pemanfaatan <i>big data</i> untuk official statistics yang mungkin sudah dilakukan NSO / lembaga internasional lain	Tersedianya dokumen hasil kajian tentang penjaminan kualitas dalam pemanfaatan <i>big data</i> oleh NSO atau lembaga internasional	Jul 2021-Jun 2022	
	Melakukan mapping antara prinsip-prinsip penjaminan kualitas yang berlaku di kegiatan statistik konvensional dan prinsip-prinsip di kegiatan pemanfaatan <i>big data</i>	Tersedianya dokumen hasil <i>mapping</i> antara prinsip-prinsip penjaminan kualitas pada kegiatan statistik konvensional dan pada kegiatan pemanfaatan <i>big data</i>	Jul 2021-Jun 2022	
	Melakukan penyusunan kerangka penjaminan kualitas (QAF) untuk pemanfaatan <i>big data</i>	Tersediannya draf dokumen kerangka penjaminan kualitas pemanfaatan <i>big data</i>	Jan-Des 2022	

Deskripsi Isu	Rencana Aksi	Output Yang Diharapkan	Periode Penyelesaian	Ukuran Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	3f. Meningkatkan kapasitas SDM di bidang pengembangan <i>big data</i> dan kecerdasan artifisial			
	Melakukan <i>capacity building</i> tim <i>big data</i> di bidang <i>data science</i> dengan mengundang narasumber dari akademisi, praktisi, maupun pihak lainnya yang mumpuni di bidang <i>data science</i>	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Tim <i>big data</i> di bidang <i>data science</i> dalam pemanfaatan <i>big data</i>	Jan 2021-Des 2022	Peningkatan pengetahuan pegawai mengenai <i>big data</i> dan peningkatan <i>expertise</i> pegawai dalam pemanfaatan <i>big data</i> untuk <i>official statistics</i>
	Melakukan <i>capacity building</i> tim <i>big data</i> di bidang <i>data engineer</i> dengan mengundang narasumber dari akademisi, praktisi, maupun pihak lainnya yang mumpuni di bidang <i>data engineer</i>	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Tim <i>big data</i> di bidang <i>data engineer</i> dalam pemanfaatan <i>big data</i>	Jan 2021-Des 2023	
	Melakukan <i>capacity building</i> tim <i>big data</i> tentang kecerdasan artifisial ( <i>Artificial Intelligence/AI</i> ) khususnya terkait dengan penggunaannya dalam pemanfaatan <i>big data</i>	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pegawai mengenai penggunaan kecerdasan artifisial dalam pemanfaatan <i>big data</i>	Jan 2022-Des 2023	

Deskripsi Isu	Rencana Aksi	Output Yang Diharapkan	Periode Penyelesaian	Ukuran Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	3g. Menyusun peraturan yang terkait dengan pemanfaatan <i>big data</i> untuk <i>official statistics</i> , termasuk aturan terkait legalitas akses yang saat ini masih merupakan grey area sehingga perlu ada penguatan hukum			
	Membuat Peraturan Badan terkait pemanfaatan data <i>e-commerce</i> dan sumber <i>big data</i> lainnya	Tersedianya rumusan peraturan atau aturan hukum yang memayungi pemanfaatan <i>big data</i> untuk <i>official statistics</i>	Jan 2022-Des 2023	Tersedianya dokumen peraturan yang mengatur legalitas akses pemanfaatan <i>big data</i> untuk <i>official statistics</i>
	Melakukan kerjasama dan komunikasi intensif dengan penyedia <i>big data</i> serta K/L terkait mekanisme pemanfaatan <i>big data</i> dan penerapan peraturan yang mendasarinya (payung hukum)	Adanya dukungan dari penyedia <i>big data</i> dan KL terkait penerapan peraturan pemanfaatan <i>big data</i>	Jan 2022-Des 2023	
	Menyusun mekanisme pengambilan data beserta metadata dari penyedia <i>big data</i> dan mekanisme pemanfaatannya	Tersedianya dokumen yang mengatur mekanisme pengambilan <i>big data</i> dari penyedia <i>big data</i> dan mekanisme pemanfaatannya	Sep 2022-Jul 2023	
	Melakukan perumusan <i>code of conduct</i> pemanfaatan <i>big data</i> untuk <i>official statistics</i>	Tersedianya rumusan kode etik pemanfaatan <i>big data</i>	Jul 2022-Jul 2023	



Deskripsi Isu	Rencana Aksi	Output Yang Diharapkan	Periode Penyelesaian	Ukuran Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	3h. Melakukan kajian pemanfaatan <i>big data</i> secara intensif untuk <i>official statistics</i> dengan menerapkan prinsip-prinsip standar dan penjaminan kualitas yang dilandasi dengan tata kelola pemanfaatan <i>big data</i> yang baik			
	Melakukan kajian secara intensif dalam pemanfaatan <i>big data</i> untuk <i>official statistics</i> dengan menerapkan kerangka penjaminan kualitas (QAF) yang memenuhi prinsip-prinsip data berkualitas	Tersedianya hasil kajian pemanfaatan <i>big data</i> untuk <i>official statistics</i> dengan menerapkan prinsip standar dan kerangka penjaminan kualitas	Jan 2023-Des 2024	Tersedianya publikasi hasil kajian pemanfaatan <i>big data</i> untuk <i>official statistics</i> yang berkualitas dari berbagai sumber <i>big data</i> yang dipublikasikan secara rutin (tiap kuartal)
	Memperluas penggunaan <i>big data</i> melalui analisis <i>big data</i> untuk berbagai kebutuhan khususnya terkait dengan <i>official statistics</i> yang dihasilkan BPS yang memenuhi prinsip-prinsip data berkualitas	Tersedianya hasil kajian pemanfaatan <i>big data</i> untuk <i>official statistics</i> yang dilakukan secara berkelanjutan dengan menerapkan prinsip standar dan kerangka penjaminan kualitas untuk memenuhi berbagai kebutuhan	2025-seterusnya	

Deskripsi Isu	Rencana Aksi	Output Yang Diharapkan	Periode Penyelesaian	Ukuran Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	3i. Melakukan penyusunan naskah akademik rencana pembentukan unit kerja khusus pengembangan <i>big data</i>			
	Melakukan studi literatur kelembagaan <i>big data</i>	Tersedianya hasil kajian/studi literatur tentang kelembagaan <i>big data</i>	Jan 2022-Jul 2023	Adanya dokumen naskah akademik mengenai rencana pembentukan unit kerja khusus pengembangan <i>big data</i> ( <i>Big Data Center</i> )
	Mempelajari <i>best practice</i> mengenai pembentukan kelembagaan <i>big data</i> yang mungkin sudah dilakukan NSO atau lembaga lainnya	Tersedianya kajian terkait praktik-priaktik yang terjadi di NSO/lembaga internasional terkait kelembagaan pengembangan <i>big data</i>	Jan 2022-Jul 2023	
	Menyusun naskah akademik rencana pembentukan unit khusus pengembangan <i>big data</i> ( <i>Big Data Center</i> )	Tersusunnya naskah akademik rencana pembentukan unit khusus pengembangan <i>big data</i>	Jan-Des 2023	

## RENCANA AKSI PENGUATAN PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL

Deskripsi Isu	Rencana Aksi	Output Yang Diharapkan	Periode Penyelesaian	Ukuran Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1. Belum tersedianya Master File Standar Data Statistik (MFSDS) Tahun 2021</b>	Pemutakhiran dan penetapan MFSDS Tahun 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Peraturan BPS tentang MFSDS Tahun 2021 yang diterbitkan tepat waktu</li> <li>2. Tersedianya regulasi kode referensi tentang KBJI (menunggu hasil diskusi)</li> </ol>	2021	Tersedianya 1 dokumen MFSDS Tahun 2021
<b>2. Belum tersedianya metadata statistik yang sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020</b>	Implementasi struktur baku metadata statistik sesuai Peraturan BPS No.5 Tahun 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya metadata statistik sesuai dengan struktur baku yang ada pada Peraturan BPS No.5 Tahun 2020</li> <li>2. Tersedianya metadata statistik untuk tabel-tabel KOR pada Statistik Indonesia dan Daerah Dalam Angka</li> </ol>	2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 80% metadata statistik dasar sesuai dengan prinsip SDI</li> <li>2. 70% K/L/D/I menyampaikan metadata sektoral sesuai standar</li> <li>3. 50% tabel KOR pada SI dan DDA dilengkapi dengan metadata statistik</li> </ol>
<b>3. Belum tersedianya SDM bidang statistik yang memadai</b>	Penyelenggaraan diklat statistik sektoral	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya diklat statistik sektoral tingkat Kab/Kota</li> <li>2. Peningkatan kapasitas SDM Bidang Statistik di tingkat kabupaten/kota</li> </ol>	Agst-Okt 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya laporan diklat statistik sektoral tingkat kab/kota</li> <li>2. 85% peserta lulus dengan kategori baik</li> </ol>
<b>4. Belum tersedianya instrumen untuk evaluasi dan monitoring penyelenggaraan statistik</b>	Penyusunan Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya instrumen IPS yang telah diujicobakan</li> <li>2. Tersedianya <i>draft</i> Peraturan BPS tentang IPS</li> </ol>	2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Instrumen IPS</li> <li>2. Tersedianya laporan sosialisasi IPS di internal maupun eksternal BPS</li> <li>3. Tersedianya laporan ujicoba instrumen IPS</li> <li>4. Tersedianya <i>draft</i> Peraturan BPS tentang IPS</li> </ol>



Deskripsi Isu	Rencana Aksi	Output Yang Diharapkan	Periode Penyelesaian	Ukuran Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penerbitan Peraturan BPS tentang Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Peraturan BPS tentang Indeks Pembangunan Statistik	2022	Tersampainya Peraturan BPS tentang IPS ke K/L/D/I
	Evaluasi penyelenggaraan statistik di K/L dengan menggunakan instrumen IPS	Nilai Indeks Pembangunan Statistik K/L	2022-2024	Nilai Indeks Pembangunan Statistik di K/L
	Evaluasi penyelenggaraan statistik di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan instrumen IPS	Nilai Indeks Pembangunan Statistik Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	2022-2024	Nilai Indeks Pembangunan Statistik di Pemerintah Provinsi
<b>5. Belum seluruh K/L/D/I melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik yang diberikan BPS</b>	Sosialisasi dan monitoring pemberian rekomendasi kegiatan statistik kepada K/L/D/I	Peningkatan jumlah kegiatan statistik sektoral yang melaksanakan rekomendasi dari BPS	2021	100% K/L/D/I melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS
<b>6. Masih minimnya pemahaman K/L/D/I tentang penyelenggaraan statistik</b>	Pembinaan statistik mengenai tata kelola data (SDI dan SSN)	Peningkatan pemahaman K/L/D/I tentang tata kelola Satu Data Indonesia	2021	30% K/L/D/I mendapatkan pembinaan statistik dari BPS
	Pembinaan statistik melalui pojok statistik	Kontribusi kalangan akademisi dalam pembinaan statistik sektoral	2022	Adanya keterlibatan akademisi dalam pembinaan statistik sektoral
	Pembinaan statistik untuk pengolahan, analisis, dan penyajian data sederhana	Peningkatan kemampuan K/L/D/I dalam pengolahan, analisis, dan penyajian data statistik	2022	40% K/L/D/I mendapatkan pembinaan statistik yang bersifat teknis dan tematik
	Pembinaan statistik untuk pengolahan dan analisis tingkat lanjutan	Peningkatan kemampuan K/L/D/I dalam pengolahan dan analisis tingkat lanjutan	2023-2024	50% K/L/D/I mendapatkan pembinaan statistik yang bersifat teknis dan tematik

Deskripsi Isu	Rencana Aksi	Output Yang Diharapkan	Periode Penyelesaian	Ukuran Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>7. Perlunya pengembangan infrastruktur statistik untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan statistik</b>	Pengembangan Website BPS untuk mendukung fungsi sebagai portal data lembaga	Pengembangan website BPS	2021	Pengembangan fitur dan penambahan konten website BPS
	Pengembangan Website Metadata Statistik	Tersedianya website metadata statistik		Tersedianya website metadata statistik
	Pembangunan platform interkoneksi data antarsistem sebagai model layanan TI pendukung SDI	Tersedia platform interkoneksi data antarsistem		Tersedianya 6 modul pada platform interkoneksi data antarsistem
	Penyediaan Sistem <i>E-Learning</i>	Tersedianya sistem <i>E-learning</i>		80% peserta diklat statistik sektoral puas terhadap sistem <i>E-learning</i> yang digunakan untuk kegiatan diklat
	Pengembangan Aplikasi Romantik Online	Pengembangan aplikasi romantik online		pengembangan modul-modul pada aplikasi romantik online
<b>8. Perlunya modul pembinaan statistik sektoral yang mutakhir</b>	Penyiapan Modul Pembinaan Statistik	Tersusunnya 4 (empat) modul yang siap digunakan untuk diklat statistik sektoral dan sebagai panduan pembinaan statistik Sektoral	Mar-Ags 2021	Tersedianya 4 Modul Pembinaan Statistik Sektoral

Deskripsi Isu	Rencana Aksi	Output Yang Diharapkan	Periode Penyelesaian	Ukuran Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>9. Perlunya pengaturan penyelenggaraan statistik yang sesuai dengan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, penguatan kelembagaan statistik nasional, dan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan statistik melalui penyusunan Perpres Sistem Statistik Nasional</b>	Penyusunan Perpres Sistem Statistik Nasional	Tersedianya Perpres SSN	2021	Terbentuknya rancangan peraturan presiden tentang Sistem Statistik Nasional
		Terselenggaranya SSN dilingkungan BPS	2022	1. Terbentuknya peraturan presiden tentang Sistem Statistik Nasional 2. Terlaksananya internalisasi dan implementasi SSN di lingkungan BPS
		Teselenggaranya SSN di K/L/D/I	2023-2024	Terlaksananya sosialisasi dan implementasi SSN di K/L/D/I



# RENCANA AKSI ADAPTASI TATA KERJA ERA BARU

Deskripsi Isu	Rencana Aksi	Output Yang Diharapkan	Periode Penyelesaian	Ukuran Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1. Pola Hubungan Kerja sebagai dampak penyederhanaan organisasi dan penyetaraan jabatan belum tersedia</b>	1. Penyusunan regulasi Pola Hubungan Kerja Baru BPS	Tersedianya regulasi tentang pola hubungan kerja	2021	2021: Adanya regulasi Pola Hubungan Kerja yang baru
	2. Penyusunan proses bisnis seluruh kegiatan sesuai Pola Hubungan Kerja yang baru	Tersusunnya proses bisnis seluruh kegiatan sesuai Pola Hubungan Kerja yang baru	2021	2022-2024: 100% satker menerapkan Pola Hubungan Kerja yang baru
	3. Persiapan penerapan Pola Hubungan Kerja yang baru, seperti: pengisian jabatan dan mutasi pegawai.	Adanya kepastian pejabat yang akan mengisi jabatan tertentu pada Pola Hubungan Kerja yang baru	2021	
	4. Sosialisasi dan penerapan pola hubungan kerja baru	Adanya pemahaman seluruh pegawai serta diterapkannya Pola Hubungan Kerja yang baru	2021-2024	
<b>2. <i>Flexible Working Space (FWS)</i> sebagai antisipasi cara kerja baru belum memiliki dasar/indikator yang komprehensif</b>	1. Pemetaan kegiatan atau proses bisnis yang dapat diterapkan FWS	Teridentifikasinya kegiatan atau proses bisnis yang dapat diterapkan FWS	2021	2021: Adanya regulasi <i>Flexible Working Space (FWS)</i> dengan indikator komprehensif
	2. Penentuan indikator untuk mendapatkan prioritas FWS	Adanya indikator penentuan prioritas FWS	2021	2022: Ada 20% pegawai prioritas yang menjalankan FWS
	3. Penyusunan regulasi FWS	Tersusunnya regulasi FWS	2021	2023: Ada 35% pegawai prioritas yang menjalankan FWS
	4. Sosialisasi, persiapan, serta penerapan FWS	Adanya pemahaman seluruh pegawai serta diterapkannya FWS	2021-2024	2024: Ada 50% pegawai prioritas yang menjalankan FWS

Deskripsi Isu	Rencana Aksi	Output Yang Diharapkan	Periode Penyelesaian	Ukuran Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>3. Office Automation System (OAS) belum optimal</b>	1. Penyempurnaan aplikasi/ sistem otomasi pekerjaan kantor yang terintegrasi dan tata kelola pelaksanaannya	Tersedianya aplikasi/ sistem terintegrasi yang mampu mengkomodir proses otomasi pekerjaan kantor	2021	2021: - 100% Satker menggunakan OAS Parsial - Draft/Kajian OAS Terintegrasi  2022: Tersedianya Aplikasi pelayanan BPS lebih sederhana (OAS Terintegrasi)
	2. Identifikasi dan pembenahan <i>Personal Information System</i> (PIS) (Sistem yang digunakan <i>single user</i> untuk meningkatkan produktivitas individu), seperti: MsOffice dan <i>Work Group Information System</i> (WGIS) (Sistem yang digunakan secara kelompok untuk meningkatkan produktivitas kelompok), seperti: MsOutlook	Tersedianya <i>Personal Information System</i> (PIS) dan <i>Work Group Information System</i> (WGIS) yang <i>update</i> dan bebas virus	2021	2023: 50% Satker menggunakan OAS Terintegrasi  2024: 100% Satker menggunakan OAS Terintegrasi
	3. Identifikasi dan pembenahan/penggabungan aplikasi-aplikasi internal BPS	Tersedianya draft/ kajian OAS yang Terintegrasi	2021	
	4. Pelatihan aplikasi PIS dan WGIS, pembangunan, dan penerapan OAS Terintegrasi	Pegawai mampu menggunakan aplikasi penunjang OAS serta tersedianya OAS yg terintegrasi	2021-2024	

## RENCANA AKSI MANAJEMEN SDM

Deskripsi Isu	Rencana Aksi	Output Yang Diharapkan	Periode Penyelesaian		Ukuran Keberhasilan
			Jangka Pendek	Jangka Menengah-Panjang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pemenuhan SDM Nonteknis</b>	Rotasi pegawai dalam jangka waktu tertentu, alternatif lain dengan penyusunan penempatan pegawai teknis pada lini nonteknis dengan penghargaan sebagai kompensasi	Kepka/Perka BPS	2022	2022-2024	Kepka/Perka BPS
	Perubahan mekanisme PMB STIS agar ditentukan formasi kebutuhan daerah (hingga level kabkot) dari awal	Kepka/Perka BPS	Des 2021	Penerapan regulasi mekanisme PMB STIS yang baru	Kepka/Perka BPS
	Pengusulan kepada Kementerian PANRB, CPNS non statistisi sebanyak 2000 (selama 4 tahun) untuk memenuhi kebutuhan di 517 satker	Proyeksi kebutuhan CPNS non statistisi	Des 2021	2022-2024	Proyeksi kebutuhan CPNS non statistisi
	Pengembangan karier lulusan STIS diarahkan tidak hanya ke bidang teknis (statistika) tetapi juga ke bidang nonteknis. Gap kompetensi ditingkatkan melalui diklat di Pusdiklat	Surat edaran utk Polstat STIS (merujuk Kepka 281)	Des 2021	2022-2024	Diklat kompetensi non statistik (Pusdiklat)
	Melakukan koordinasi dengan Kemenkeu untuk meminta formasi tenaga administrasi dari PKN STAN.	Alokasi SDM dari Kemenkeu untuk memenuhi jabatan non-teknis.	Des 2021	2022-2023	ABK + Anjab nonteknis dan formasi nonteknis



Deskripsi Isu	Rencana Aksi	Output Yang Diharapkan	Periode Penyelesaian		Ukuran Keberhasilan
			Jangka Pendek	Jangka Menengah-Panjang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>2. Mekanisme perpindahan pegawai</b>	Perpindahan pegawai dengan jabatan fungsional muda ke bawah dalam satu provinsi dapat dikelola langsung oleh BPS Provinsi.	Perka yang mengatur pelimpahan kewenangan	Des 2021	2021-2022	Perka BPS
<b>3. Human Capital Development Plan: pola karier</b>	Manajemen talenta dilakukan dengan mengkombinasikan uji kompetensi (assessment) dengan kinerja	Regulasi manajemen talenta	Des 2021	2021-2022	Terpetakkannya pegawai berdasarkan kompetensi dan kinerja
	Mengevaluasi hasil uji kompetensi dan penilaian kinerja Madya dan Eselon III (evaluasi 9 box) untuk pengembangan SDM.	Review dokumen HCDP (Madya dan Eselon III)	Des 2021	2021-2022	
<b>4. Formasi pegawai berdasarkan hasil ABK terbaru</b>	Membatasi formasi di setiap unit kerja menjadi maksimal 70% untuk mengatur keseimbangan formasi pegawai di wilayah lain.	Realokasi dan pemetaan sesuai ABK yang baru: daftar formasi tiap unit kerja	Des 2021	2022-2024	Pegawai terdistribusi secara merata

## RENCANA AKSI KINERJA TERPADU UNTUK BPS BERKELAS DUNIA

Deskripsi Isu	Rencana Aksi	Output Yang Diharapkan	Periode Penyelesaian	Ukuran Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1. Indikator kinerja belum dijabarkan dengan baik sampai dengan jabatan terendah dan selaras</b>	1. Pelaksanaan evaluasi mengenai cascading visi dan misi BPS	Juknis tata cara cascading dan penyusunan indikator kinerja	Des 2021	Penerapan petunjuk teknis cascading kinerja yang standar sudah dilakukan dengan benar
	2. Penerjemahan visi dan misi secara berjenjang sampai jabatan terendah berdasarkan lingkup tugas dan fungsinya		Des 2021	
	3. Penyusunan pedoman standar penyusunan Rencana Strategis BPS		Des 2021	
	4. Reviu Perka mengenai indikator kinerja		Des 2021	
	5. Mengamati, meniru, dan memodifikasi Renstra dan IKU dari K/L lain		Des 2021	
<b>2. Indikator kinerja masih berorientasi pada proses, bukan pada output/hasil</b>	1. Penyusunan output dan outcome dari indikator kinerja	Juknis tata cara cascading dan penyusunan indikator kinerja	Des 2021	Penerapan petunjuk teknis cascading kinerja yang standar sudah dilakukan dengan benar
	2. Pengembangan ukuran akurasi/kualitas kegiatan di BPS (tidak hanya terbatas dari RSE) dan <i>quality gates</i>		Des 2021	

Deskripsi Isu	Rencana Aksi	Output Yang Diharapkan	Periode Penyelesaian	Ukuran Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>3. Rendahnya pemahaman &amp; tidak terstandar-disasinya target indikator</b>	Pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi secara intensif	Juknis tata cara cascading dan penyusunan indikator kinerja	Des 2021	Penerapan petunjuk teknis cascading kinerja yang standar sudah dilakukan dengan benar
<b>4. Sistem manajemen kinerja BPS belum mengacu sepenuhnya kepada Permenpan RB Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021</b>	Penyempurnaan sistem manajemen kinerja BPS	Juknis tata cara cascading dan penyusunan indikator kinerja	Des 2021	Penerapan petunjuk teknis cascading kinerja yang standar sudah dilakukan dengan benar



## RENCANA AKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Deskripsi Isu	Rencana Aksi	Output Yang Diharapkan	Periode Penyelesaian		Ukuran Keberhasilan
			Jangka Pendek	Jangka Menengah-Panjang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Belum seluruh unit dan satuan kerja melakukan pemetaan risiko dan menyusun rencana tindak lanjut pengendaliannya	Penyempurnaan proses bisnis manajemen risiko (MR)	Pedoman pelaksanaan MR (Peraturan Kepala/Perban)	November 2021		<b>75% unit dan satuan kerja telah mengimplementasikan manajemen risiko pada Tahun 2024.</b>  2021 Pedoman MR dan penanaman budaya risiko lewat sosialisasi di unit dan satuan kerja.  2022 • Juknis, aplikasi, pembinaan dan sosialisasi MR, • Terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) MR di 25% unit dan satuan kerja • Terbentuknya Tim Kepatuhan Internal di 25% BPS Provinsi.
		Petunjuk teknis MR (dari pusat)		Semester 1 Tahun 2022	
	Penyempurnaan aplikasi MR	Aplikasi MR yang telah disempurnakan		September 2022	
	Penyusunan kebijakan internal mengenai MR	Pedoman teknis MR internal unit kerja		Semester 2 Tahun 2022	
	Pembentukan struktur MR	Struktur MR di setiap unit dan satuan kerja Eselon 3 Kab/Kota		Semester 2 Tahun 2022	
	Pembinaan dan sosialisasi MR	SDM yang memahami implementasi MR		Semester 2 Tahun 2022	
	Implementasi MR di setiap unit dan satuan kerja	Register risiko dan peta risiko		Semester 2 Tahun 2022	

Deskripsi Isu	Rencana Aksi	Output Yang Diharapkan	Periode Penyelesaian		Ukuran Keberhasilan
			Jangka Pendek	Jangka Menengah-Panjang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Monitoring dan evaluasi berkelanjutan ( <i>Continuous auditing continuous monitoring</i> ) untuk menunjukkan perbaikan kinerja dari penerapan MR.	Laporan monitoring dan evaluasi secara berkala		Setiap semester mulai tahun 2022	2023 Laporan monev pelaksanaan MR dan target penerapan MR 50%  2024 Penerapan MR mencapai 75% dan laporan perbaikan kinerja dari penerapan MR.
	Pembentukan tim kepatuhan internal di satuan kerja BPS Provinsi sebagai bagian dari pengelolaan risiko	SK tim kepatuhan internal di BPS Provinsi		Semester 2 Tahun 2022	

Deskripsi Isu	Rencana Aksi	Output Yang Diharapkan	Periode Penyelesaian		Ukuran Keberhasilan
			Jangka Pendek	Jangka Menengah-Panjang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>2. Peran APIP sebagai <i>quality assurance</i> dan <i>consulting</i> belum optimal</b>	Pembentukan auditor mitra satuan kerja (AMS)	SK auditor mitra satuan kerja	Desember 2021		<b>Kapabilitas APIP level 3,5 atau lebih pada tahun 2024</b>  2021-2024 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengikutsertaan auditor dalam pelatihan audit berkala 10% dari jumlah pegawai Inspektorat dan penambahan 10% SDM APIP yang memiliki sertifikasi profesi dan pendukung.</li> <li>• Kompilasi laporan layanan revidan probity audit yang diselesaikan tepat waktu sebesar 75%.</li> </ul>
	Penyempurnaan aplikasi konsultasi <i>on-line</i> yaitu HALO Inspektorat	Aplikasi HALO Inspektorat yang sudah siap digunakan	2021		
	Implementasi aplikasi konsultasi <i>on-line</i> yaitu HALO Inspektorat	Daftar hasil konsultasi HALO Inspektorat	Sepanjang Tahun 2021		
	Penyempurnaan proses bisnis pengawalan pengadaan barang dan jasa (PBJ)	Petunjuk teknis pelayanan revidan PBJ secara cepat, transparan, berkualitas "CETAR"	Desember 2021		
	Penyempurnaan aplikasi pengawalan PBJ ( <i>current audit</i> )	Aplikasi <i>current</i> audit yang telah disempurnakan		2022	
	Implementasi pengawalan PBJ (melalui 2 jalur yaitu <i>current</i> audit atau tradisional)	Laporan hasil pengawalan pelaksanaan revidan dan <i>probity</i> audit PBJ		Setiap semester 2022-2024	
	Peningkatan kompetensi SDM APIP melalui diklat sertifikasi profesi dan pendukung	Jumlah SDM APIP yang mengikuti pendidikan sertifikasi profesi dan pendukung		2022-2024	



Deskripsi Isu	Rencana Aksi	Output Yang Diharapkan	Periode Penyelesaian		Ukuran Keberhasilan
			Jangka Pendek	Jangka Menengah-Panjang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>3. APIP belum berperan dalam pengawasan pencapaian kinerja organisasi</b>	Penyusunan pedoman dan pelaksanaan audit kinerja terhadap tugas dan fungsi (tusi) mempertimbangkan perbaikan proses bisnis dan arah kebijakan strategis	Pedoman audit kinerja terhadap tusi dengan fokus pada perbaikan proses dan arah perbaikan kebijakan strategis	Desember 2021		Tindak lanjut atas rekomendasi temuan audit pengawasan kinerja terhadap tusi dan tindak lanjut hasil pendampingan <i>probity</i> dan pembinaan SAKIP sebesar 80%.
		Laporan hasil audit kinerja secara periodik terhadap tusi		Setiap Desember (2022–2024)	2021 Penyusunan pedoman audit kinerja.
	Pelaksanaan pendampingan/ <i>probity</i> audit pada kegiatan strategis BPS	Laporan hasil pendampingan/ <i>probity</i> audit pada kegiatan strategis BPS		Setiap Desember (2022–2024)	Laporan Tahunan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Satu laporan pelaksanaan audit kinerja;</li> <li>• Satu laporan <i>probity</i> audit;</li> <li>• Dua laporan pendampingan SAKIP;</li> <li>• Satu laporan movev SAKIP.</li> </ul>
	Pelaksanaan pendampingan pembinaan SAKIP pada unit dan satuan kerja	Laporan hasil pendampingan pembinaan SAKIP pada unit dan satuan kerja		Setiap Desember (2021–2024)	
	Monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut evaluasi SAKIP	Laporan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut evaluasi SAKIP		Setiap Desember (2021–2024)	

Deskripsi Isu	Rencana Aksi	Output Yang Diharapkan	Periode Penyelesaian		Ukuran Keberhasilan
			Jangka Pendek	Jangka Menengah-Panjang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>4. Penerapan SPIP dan level maturitas SPIP belum optimal</b>	Pembinaan pengukuran maturitas SPIP ke seluruh unit dan satuan kerja	Laporan pelaksanaan <i>Workshop</i> penilaian maturitas SPIP	Agustus 2021		<b>Level Maturitas SPIP 3,5 pada tahun 2021 dan 3,75 pada akhir tahun 2024 sesuai RPJMN 2020-2024.</b>  2021 Seluruh unit Eselon 1 dan 2, termasuk Politeknik Statistika STIS, sudah melakukan penilaian mandiri maturitas SPIP.
		Laporan pelatihan penilaian mandiri maturitas SPIP seluruh unit dan satuan kerja (termasuk BPS Kab/Kota) kerjasama dengan Pusdiklat		Desember 2022	
	Unit dan satuan kerja memutakhirkan satuan tugas (satgas) SPIP	SK terkait pemutakhiran Satgas SPIP	Desember 2021		2022 Seluruh unit Eselon 1 dan 2, termasuk Politeknik Statistika STIS, telah menindaklanjuti AOI dari hasil penilaian tahun 2021.
	Unit dan satuan kerja melakukan penilaian mandiri atas maturitas SPIP	Laporan penilaian mandiri maturitas SPIP unit dan satuan kerja	Sept 2021	Setiap Bulan Agustus tahun berikutnya	Seluruh unit kerja (paling tidak satu orang per unit) telah mengikuti pelatihan penilaian mandiri maturitas SPIP
	Unit dan satuan kerja membuat rencana aksi atas <i>Area of Improvement</i> (AOI)	Rencana aksi AOI	Oktober 2021	Setiap Bulan September tahun berikutnya	
	Monitoring dan evaluasi atas AOI yang disusun unit dan satuan kerja oleh Inspektorat Utama	Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas AOI unit dan satuan kerja	Januari 2022	Setiap Bulan November tahun berikutnya	Selanjutnya mulai 2022-2024 Seluruh unit Eselon 1 dan 2 termasuk Politeknik Statistika STIS serta 10% Kab/Kota melakukan penilaian mandiri dan menindaklanjuti AOI yang telah disusun.

Deskripsi Isu	Rencana Aksi	Output Yang Diharapkan	Periode Penyelesaian		Ukuran Keberhasilan
			Jangka Pendek	Jangka Menengah-Panjang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Unit dan satuan kerja mendo- kumentasikan pelaksanaan rencana aksi dan capaiannya untuk persiapan penilaian maturitas SPIP	Dokumentasi atau aplikasi rencana dan capaian perbaikan atas rekomendasi penilaian maturitas SPIP	November 2021-Mei 2022	Setiap Bulan Oktober hingga Mei tahun berikutnya	
	Monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut rekomendasi perbaikan AOI dengan menunjukkan hasil yang dicapai	Laporan hasil monitoring dan evaluasi penerapan rekomendasi dan hasil yang dicapai dari penerapan rekomendasi perbaikan AOI	Juni 2022	Setiap Bulan Juni tahun berikutnya	
	Melakukan penilaian mandiri maturitas SPIP kembali.	Pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP kembali sebagai sebuah siklus.	Juli 2022	Setiap Bulan Juli tahun berikutnya	



# MANAJEMEN PERUBAHAN BPS



Manajemen perubahan berperan dalam merencanakan dan mengelola setiap perubahan sebaik mungkin agar seluruh insan BPS peduli (*aware*), paham (*understand*), menerima serta mempunyai komitmen untuk mendukung pelaksanaan program perubahan di BPS.

**U**paya yang dilakukan manajemen perubahan dalam melaksanakan perannya antara lain:

1. Memotivasi semua insan BPS agar mau dan merasa perlu untuk segera berubah.
2. Meningkatkan peran agen perubahan sebagai *role model* dalam melaksanakan perubahan serta fungsinya dalam mentransmisikan setiap perubahan yang dirumuskan BPS.
3. Menerjemahkan visi ke dalam strategi yang konkrit serta mengkomunikasikannya ke seluruh insan BPS agar memiliki kesamaan dan pemahaman yang



**Dokumentasi:** *Workshop Change Management BPS 2019*

- baik serta dapat diterima oleh semua insan BPS.
4. Mengatasi dampak yang timbul akibat perubahan yang terjadi serta memberikan dukungan agar semua insan BPS dapat melaksanakan perannya dalam pencapaian keberhasilan perubahan.
  5. Memberikan penghargaan terhadap pencapaian jangka pendek untuk meningkatkan semangat pendukung perubahan dan meningkatkan ketertarikan kelompok yang belum mendukung perubahan untuk bergabung dalam mendukung perubahan.
  6. Memperkuat perubahan dengan melakukan evaluasi serta melakukan perbaikan secara terus menerus.
  7. Memastikan perubahan sebagai budaya organisasi sehingga perubahan benar-benar mengakar sampai ke struktur organisasi yang paling bawah





# MARI BERLAYAR

Nakhoda sehebat apapun tidak akan mampu membuat kapal besar ini berlayar tanpa bantuan dari seluruh awak. Setiap dari kita memiliki peran yang berarti.

**Sekecil apa pun perannya, kalian sangat dibutuhkan untuk menjadikan kapal ini terus melaju. BPS ibarat kapal. Tempatkan posisi kita sesuai dengan kapasitasnya. Berikan yang terbaik. Anda, saya, dan kita semua harus bersinergi untuk membawa BPS berlayar lebih jauh lagi.**

**A**rah perubahan baru BPS tahun 2021-2024 telah dituangkan dalam tujuh langkah strategis oleh para pemimpin kita. Narasi-narasi yang baru saja selesai diceritakan

lewat sudut pandang mereka adalah rangkaian rencana aksi dari langkah perubahan tersebut. Rencana aksi ini disusun sesegera mungkin agar bisa menjawab momentum besar





# AR BERSAMA

pergantian nakhoda. Tentunya dengan melibatkan banyak pihak, yang bekerja keras siang dan malam agar berita baik ini bisa cepat tersampaikan ke seluruh jajaran pegawai BPS. Adapun kekurangan, baik dalam narasi maupun pendetailan rencana aksi, akan disempurnakan seiring dengan realisasinya.

Implementasi dari rencana aksi tentu membutuhkan partisipasi dan kolaborasi berbagai pihak, baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, akan dibentuk tim-tim pelaksana untuk mendorong realisasi perubahan jangka pendek di akhir 2021 ini. Selanjutnya dengan adanya arah perubahan baru, kita harap BPS tidak lagi terkotak-kotak, tetapi bisa bersatu padu dalam mewujudkan statistik

berkualitas. Semua permasalahan, utamanya terkait kelembagaan dapat dipecahkan bersama.

Segenap jajaran pimpinan yang baru akan berupaya menakhodai BPS untuk terus berlayar, bertumbuh, dan menjadi kapal yang disegani oleh banyak orang.

Terima kasih karena selama ini sudah selalu ada untuk BPS. Yakinlah bahwa setiap kontribusi yang kita berikan pasti bermakna. Bukan hanya bagi organisasi, tetapi juga untuk kemaslahatan umat manusia.

# Terima Kasih

Atas kerja keras dan kontribusinya dalam menyusun buku ini.

<b>Kepala BPS RI</b> Dr. Margo Yuwono, S.Si, M.Si.  <b>Ketua RB</b> Ir. Atqo Mardiyanto, M.Si.  <b>Koordinator</b> Hanung Pramusito, SST, S.Si, ME, MPP  <b>Monitoring</b> 1. Undich Sadewo Sunu 2. Dewi Kartika Megasari 3. Elwatryn Yosvia 4. Titis Wahyu Setiyowati  <b>Anggota Layout</b> 1. 'Aisyah Durrotussa'adah 2. Ricky Eben Ezer 3. Meisye Evelynne Alfian 4. Yoga Wira 5. Denisa Sarawasti 6. Muhammad Budiman 7. Rikza Fatikha Martha 8. Miftah Amalia Putri  <b>Naskah</b> 1. Dina Rizkiani 2. Laksita Aga Damayanti 3. Rela Sabtiana 4. Auli Nahdia 5. Febri Hamdani 6. Farah Diza 7. Isaura Paradise  <b>Editor</b> 1. Aina Sabedah Fitri 2. Ferika Melati 3. Panca Dwi Prabawa  <b>Ilustrasi &amp; Photo</b> 1. Brata Sanjaya 2. Fadil Rifkiyuda  <b>Desain &amp; Layout</b> Zulhan Rudyansyah, SE, ME	<b>Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI)</b>  <b>Ketua</b> Dr. Ateng Hartono SE, M.Si  <b>Anggota Pusat</b> 1. Dr. Nurma Midayanti SSi, M.Env.Sc 2. Ahmad Avenzora SE, MSE 3. Harmawanti Marhaeni M.Sc.  <b>Daerah</b> 1. Dr Syech Suhaimi SE, M.Si 2. Ir Faizal Anwar M.T 3. Ir. Adhi Wiriana M.Si. 4. Ir. Eko Marsoro MM. 5. Mukhamad Mukhanif S.Si, M.Si  <b>PMO Ketua</b> Ahmad Avenzora SE, MSE  <b>Anggota</b> 1. Nur Sahrizal 2. Budi Santoso 3. Alfina Fasriani 4. Mayang Sari	<b>Transformasi Proses Bisnis Statistik</b>  <b>Ketua</b> Moh Edy Mahmud S.Si, M.P  <b>Anggota Pusat</b> 1. Ir. Dody Herlando M.Econ. 2. Puji Agus Kurniawan S.Si., M.A 3. Dr. Ali Said MA. 4. Dr. Titi Kanti Lestari SE, M.Com. 5. Dr. Sarpono S.Si, M.Sc  <b>Daerah</b> 1. Ir. Herum Fajarwati M.M 2. Drs. Wahyudin M.M 3. NTB 4. Agus Gede Hendrayana Hermawan SE, M.Si 5. Suntono SE, M.Si  <b>PMO Ketua</b> Puji Agus Kurniawan S.Si., M.A  <b>Anggota</b> 1. Widdia Angraini 2. Yeshri Rahayu 3. Dimas Hari Santoso 4. Nora Muhtasib	<b>Pembinaan Statistik Sektoral</b>  <b>Ketua</b> Dr. Eng. Imam Machdi M.T.  <b>Anggota Pusat</b> 1. Endang Retno Sri Subiyandani S.Si, M.M. 2. Dr. Pudji Ismartini M.App.Stat 3. Dr. Muchammad Romzi  <b>Daerah</b> 1. Drs. Misfaruddin M.Si 2. Sentot Bangun Widoyono M.A. 3. Yos Rusdiansyah SE, MM 4. Asim Saputra SST, M.Ec.Dev.  <b>PMO Ketua</b> Dr. Muchammad Romzi  <b>Anggota</b> 1. Herman Saputra 2. Anna Sofiana 3. Irvan Rahman Saleh 4. Maslim Rajab Syafrizal
---	--	--	--



Tata Kerja Baru	Manajemen SDM	Kinerja Terpadu	Pengendalian dan Pengawasan Internal
<p><b>Ketua</b> M. Habibullah S.Si, M.Si</p> <p><b>Anggota Pusat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Marsudijono S.Si, MM</li> <li>2. Dr. Kadarmanto M.A.</li> <li>3. Drs. Simon Sapary M.Sc</li> <li>4. Aryanto S.Si., M.M</li> </ol> <p><b>Daerah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ir. Zulkipli M.Si</li> <li>2. Agus Sudibyo M.Stat</li> <li>3. Dr. Drs. Anggoro Dwitjahyono M.Si</li> <li>4. Sulawesi Tengah</li> <li>5. Adriana Helena Carolina SE, M.M.</li> </ol> <p><b>PMO Ketua</b> Aryanto S.Si., M.M</p> <p><b>Anggota</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hengki Eko Riyadi</li> <li>2. Rr Nila Indrasari</li> <li>3. Dwi Susilo</li> <li>4. Fajar Handayani</li> </ol>	<p><b>Ketua</b> Ir. Atqo Mardiyanto, M.Si.</p> <p><b>Anggota Pusat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atas Parindungan Lubis S.Si, M.Si</li> <li>2. Eni Lestariningsih S.Si, M.A</li> <li>3. Dr. Erni Tri Astuti M. Math</li> </ol> <p><b>Daerah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami S.Si, M.Si</li> <li>2. Dr. Dadang Hardiwan S.Si, M.Si</li> <li>3. Hanif Yahya S.Si.,M.Si</li> <li>4. Tina Wahyufitri S.Si.M.Si</li> <li>5. Maritje Pattiwaellapia SE, M.Si</li> </ol> <p><b>PMO Ketua</b> Atas Parindungan Lubis S.Si, M.Si</p> <p><b>Anggota</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sjafidryanto</li> <li>2. Brata Sanjaya</li> <li>3. Sri Wahyuni</li> <li>4. Edwin Triyoga</li> </ol>	<p><b>Ketua</b> Setianto S.E, M.Si</p> <p><b>Anggota Pusat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ir. Atqo Mardiyanto M.Si.</li> <li>2. Ir. Efliza ME</li> <li>3. Nurul Hasanudin SST.,M.Stat</li> </ol> <p><b>Daerah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sugeng Arianto M.Si.</li> <li>2. Dyah Anugrah Kuswardani MA</li> <li>3. Moh Wahyu Yulianto S.Si., SST, M.Si</li> <li>4. Agnes Widiastuti S.Si, ME.</li> <li>5. Aidil Adha SE, ME</li> </ol> <p><b>PMO Ketua</b> Nurul Hasanudin SST.,M.Stat</p> <p><b>Anggota</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Andri Yudhi Supriadi</li> <li>2. Sri Andayani</li> <li>3. Agus Suryono</li> <li>4. Siyam Sunarsah</li> </ol>	<p><b>Ketua</b> Drs. Akhmad Jaelani M.Si</p> <p><b>Anggota Pusat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Irwil I</li> <li>2. Ir. Endang Tri Wahyuningsih MM</li> <li>3. Jamason Sinaga AK., MAP</li> <li>4. Darusman S.Si, MM.</li> </ol> <p><b>Daerah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ihsanurijal S.Si, M.Si</li> <li>2. Ir. Win Rizal M.E.</li> <li>3. Buyung Airlangga M.Bus.</li> <li>4. Darwis Sitorus S.Si, M.Si</li> <li>5. Asep Riyadi S.Si., M.M</li> </ol> <p><b>PMO Ketua</b> Jamason Sinaga AK., MAP</p> <p><b>Anggota</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mulia Andestar</li> <li>2. Amiruli D. Listiarto</li> <li>3. Eko Libri Ardi</li> <li>4. Muhammad Subhan</li> </ol>



# GLOSARIUM

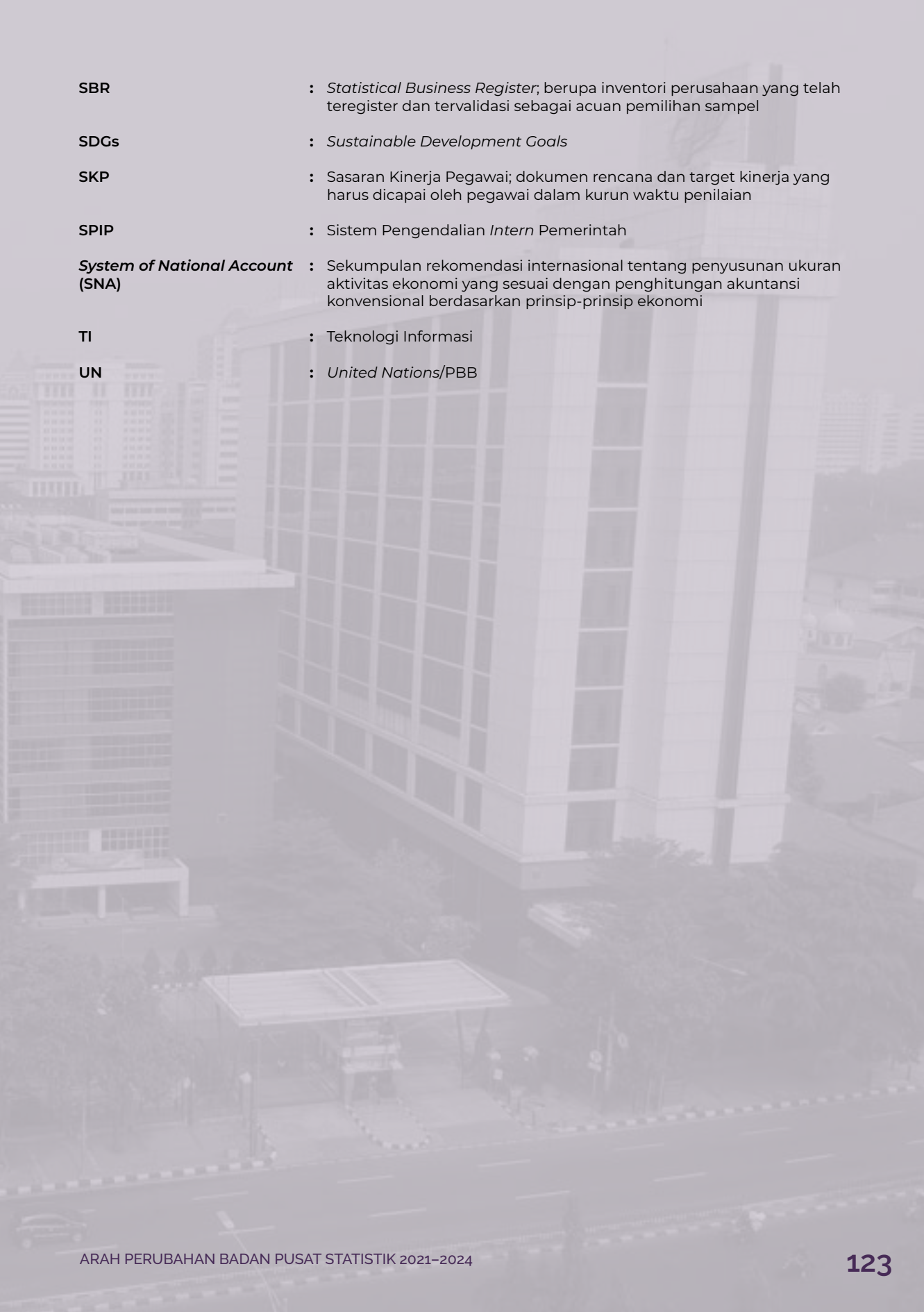
<b>Analisis beban kerja</b>	: Dokumen yang berisi informasi tentang beban kerja suatu jabatan dihitung berdasarkan waktu penyelesaian suatu pekerjaan dalam suatu periode
<b>Analisis jabatan</b>	: Dokumen yang berisi informasi tentang jabatan yang tersedia dalam organisasi sesuai dengan proses bisnis yang dilakukan di dalam organisasi tersebut, komposisinya berupa uraian tugas, tanggung jawab, wewenang, kebutuhan pekerjaan, sampai dengan kelas jabatan
<b>Assessment</b>	: Suatu tahapan evaluasi atau penilaian terhadap kinerja pegawai untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh setiap pegawai
<b>Balance Score Card</b>	: Metode pengukuran hasil kerja menggunakan 4 perspektif, yakni perspektif keuangan, perspektif pelanggan/pengguna, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.
<b>Big data</b>	: Kumpulan proses yang terdiri dari volume data dalam jumlah besar, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur dan digunakan untuk membantu untuk kegiatan bisnis
<b>Cascading kinerja</b>	: Proses penjabaran sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja organisasi secara vertikal dan horizontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam organisasi.
<b>Data science</b>	: Ilmu yang menggabungkan matematika, statistika, dan ilmu komputer dengan tujuan untuk analisis data dari suatu himpunan data baik skala kecil maupun besar
<b>Decision Support System</b>	: Manajemen pengetahuan yang berperan dalam mendukung proses pengambilan keputusan pada suatu organisasi
<b>Evaluasi 9 box</b>	: Penempatan seseorang pada matriks 9 kotak berdasarkan hasil <i>assessment</i> , kompetensi, dan kinerja pegawai, sehingga dapat diketahui berapa banyak talenta dan gap kompetensi yang perlu dikembangkan
<b>Formasi</b>	: Jumlah/posisi setiap jabatan yang dibutuhkan untuk menjalankan proses bisnis standar
<b>Geospasial</b>	: Aspek keruangan yang menunjukkan lokasi/letak/posisi suatu objek/kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu
<b>HALO Inspektorat</b>	: Aplikasi yang melayani proses konsultasi pengawasan internal BPS
<b>Kompetensi</b>	: Kemampuan/pengetahuan yang dibutuhkan untuk menuntaskan suatu pekerjaan
<b>Lolos butuh</b>	: Proses mekanisme perpindahan pegawai antar instansi sesuai dengan peraturan yang berlaku
<b>Manajemen karier</b>	: Pola pengembangan karier di dalam organisasi yang menyelaraskan antara perencanaan karier dari sisi pegawai dan jalur karier dari sisi organisasi

<b>Manajemen talenta</b>	: Proses yang dilakukan organisasi untuk mengelola dan mengembangkan SDM sebagai suksesi kepemimpinan di masa yang akan datang, pengelolaan ini dimulai dari perekrutan, pengembangan, sampai dengan penempatan SDM sebagai penerus dari posisi yang diinginkan oleh organisasi
<b>Maturitas SPIP</b>	: Tingkatan kemampuan tertinggi dalam proses pengendalian internal
<b>Mutasi</b>	: Proses kepegawaian terkait dengan kenaikan jabatan (promosi), perpindahan jabatan baik secara fungsi maupun lokasi (rotasi), Penurunan jabatan (demosi)
<b>Official statistics</b>	: Statistik yang dipublikasikan oleh lembaga (instansi) pemerintah, seperti kementerian atau lembaga pemerintah termasuk lembaga atau organisasi internasional.
<b>Performa 360</b>	: Aplikasi yang digunakan untuk menilai kinerja seseorang berdasarkan persepsi dari lingkungan dalam hal ini meliputi persepsi dari bawahan, kolega, dan atasan
<b>Probity audit</b>	: Jaminan yang diberikan untuk melakukan pengawasan independen terhadap suatu proses pengadaan barang/jasa
<b>Proyeksi kebutuhan CPNS</b>	: Estimasi jumlah formasi yang dibutuhkan oleh organisasi berdasarkan penghitungan beban kerja organisasi dalam kurun waktu tertentu
<b>Quality Gates</b>	: <i>Milestone</i> dalam program yang dibutuhkan berupa kriteria-kriteria/ standar kualitas yang harus dipenuhi sebelum output dihasilkan
<b>Respondent burden</b>	: Usaha yang dibutuhkan oleh seseorang untuk menjawab satu atau lebih kuesioner secara tepat dan cepat
<b>Road map</b>	: Dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rentang waktu tertentu
<b>Sistem Merit</b>	: Sistem penataan SDM yang komprehensif di mulai dari perencanaan, rekrutmen, orientasi, pengembangan pengukuran kinerja, manajemen karier, kompensasi dan benefit serta retensi, sampai dengan pensiun.
<b>Stakeholder</b>	: Pemangku kepentingan
<b>Statistik sektoral</b>	: Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu
<b>Trusted advisor</b>	: Fungsi yang mampu memberikan rekomendasi dan evaluasi, serta jalan keluar bagi sebuah isu atau temuan
<b>Watch dog</b>	: Fungsi pengawasan

# DAFTAR SINGKATAN

AMS	: Auditor Mitra Satuan Kerja
AOI	: <i>Area of Improvement</i>
APIP	: Aparat Pengawas Intern Pemerintah
Bappenas	: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas
Dirjen Dukcapil	: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
HCDP	: <i>Human Capital Development Plan</i> ; Dokumen yang memuat strategi pengembangan SDM organisasi meliputi perencanaan pengembangan kompetensi yang di butuhkan dalam organisasi guna menunjang kegiatan pokok.
IKU	: Indikator Kinerja Utama; ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi
K/L/D/I	: Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Instansi yang menggunakan anggaran APBN dan/atau APBD
Kemdikbudristek	: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kemenpan RB	: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Kominfo	: Kementerian Komunikasi dan Informatika
MR; Manajemen risiko	: Proses kegiatan yang dilakukan untuk meminimalkan/mencegah terjadinya risiko dalam suatu proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi
<i>National Statistics Office (NSO)</i>	: Badan yang menangani Kegiatan Statistik pada suatu negara
<i>National Strategies for the Development of Statistics (NSDS)</i>	: Strategi Nasional Pembangunan Statistik pada suatu negara
Paris21	: <i>The Partnership in Statistics for Development in the 21st Century</i>
PK	: Perjanjian kinerja; dokumen yang memuat hal-hal yang harus diselesaikan oleh suatu jabatan dalam kurun waktu tertentu
Renstra	: Rencana Strategis; Suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama periode 5 (lima) tahun
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah





<b>SBR</b>	: <i>Statistical Business Register</i> ; berupa inventori perusahaan yang telah teregister dan tervalidasi sebagai acuan pemilihan sampel
<b>SDGs</b>	: <i>Sustainable Development Goals</i>
<b>SKP</b>	: Sasaran Kinerja Pegawai; dokumen rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian
<b>SPIP</b>	: Sistem Pengendalian <i>Intern</i> Pemerintah
<b>System of National Account (SNA)</b>	: Sekumpulan rekomendasi internasional tentang penyusunan ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan akuntansi konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi
<b>TI</b>	: Teknologi Informasi
<b>UN</b>	: <i>United Nations/PBB</i>



# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK**

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax : (021) 3857046

Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : [bpshq@bps.go.id](mailto:bpshq@bps.go.id)